

KODE KLASIFIKASI	DESKRIPSI	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	PENGUNA	UNIT PENANGGUNG JAWAB
			AKTIF	INAKTIF						
<b>RC. PERENCANAAN</b>										
01	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	1 Tahun setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	RPJMN Nasional yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	1 Tahun setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
03	<b>Rencana strategis (Renstra)</b>									
01	Renstra Kementerian Nasional/nasional yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Kementerian BUMN yang merupakan perjabaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).	Renstra Kementerian	1 Tahun setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	Renstra Unit Kerja Nasional/nasional yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Unit eselon 1 Kementerian BUMN yang merupakan perjabaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).	Renstra Unit Kerja	1 Tahun setelah Tidak Berlaku	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
04	<b>Rencana kerja</b>									
01	Rencana Kerja Kementerian Nasional/nasional yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan unit kerja Kementerian BUMN terdiri dari hasil pembahasan dari pertemuan multilateral, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, pertemuan Trilateral (Bappenas, Dirjen Anggaran/DJA, KBUMN) dan Bilateral (Bappenas/DJA, KBUMN).	Rencana kerja Kementerian	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	Rencana Kerja Unit Kerja Arsip yang terkait Nasional/nasional yang berkaitan dengan perjabaan dan kegiatan unit kerja eselon II yang merupakan perjabaan dari Renstra dalam satu tahun anggaran.	Rencana kerja unit kerja	1 tahun	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
05	Ketetapan Pagu Indikatif/Sementara Nasional/nasional yang berkaitan dengan proses penetapan pagu indikatif/sementara.	Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, RAKAKL masing-masing unit kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) perencanaan, RAB dan persetujuan Komisi VI DPR RI.	1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
06	Ketetapan Pagu Definitif Nasional/nasional yang berkaitan dengan proses penetapan pagu definitif	Surat Menteri Keuangan tentang alokasi pagu definitif, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (KL) masing-masing unit kerja, KAK Perencanaan, Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan Persetujuan Komisi VI DPR RI.	1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
07	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Revisi Nasional/nasional yang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan proses persetujuan revisi anggaran terdiri dari DIPA APBN, DIPA APBN-P dan DIPA Revisi.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan proses persetujuan revisi anggaran terdiri dari DIPA APBN, DIPA APBN-P dan DIPA Revisi.	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
08	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk revisinya Nasional/nasional yang berkaitan dengan pengistian aplikasi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari masing-masing unit kerja termasuk revisinya.	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk revisinya.	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
09	<b>Penetapan Kinerja</b>									
01	Penetapan Kinerja Menteri BUMN Nasional/nasional yang berkaitan dengan dokumentasi Penetapan Kinerja (PK) Kementerian BUMN	PK Kementerian BUMN	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	Penetapan Kinerja Unit Kerja Nasional/nasional yang berkaitan dengan dokumentasi Penetapan Kinerja (PK) masing-masing unit kerja	PK Unit Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
10	<b>Laporan/Output Kinerja</b>									
01	Laporan Pelaksanaan Program Kerja Nasional/nasional yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan program kerja.	Laporan Pelaksanaan Program Kerja Nasional/nasional yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan program kerja.	1 tahun	2 tahun	Musnah kecuali laporan tahunan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Nasional/nasional yang berkaitan dengan laporan monitoring dan evaluasi program kerja.	Laporan Monitoring dan Evaluasi program Kerja baik bulanan, triwulan dan semester.	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
11	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nasional/nasional yang berkaitan dengan penyusunan LAKIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian dan Unit Kerja Nasional/nasional yang berkaitan dengan penyusunan LAKIP	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali LAKIP Kementerian	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
12	<b>Penetapan Ukuran Kinerja</b>									
01	Penetapan Ukuran Kinerja Kementerian Nasional/nasional yang berkaitan dengan penetapan indikator kinerja utama Kementerian BUMN.	Penetapan Ukuran Kinerja	1 Tahun setelah Tidak Berlaku	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	Penetapan Ukuran Kinerja Unit Kerja Nasional/nasional yang berkaitan dengan penetapan indikator kinerja unit.	Penetapan Ukuran Kinerja	1 Tahun setelah Tidak Berlaku	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
13	<b>Monitoring Kinerja</b>									
01	Monitoring Kinerja Kementerian Nasional/nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring kinerja Kementerian	Kinerja Kementerian	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	Monitoring Kinerja Unit Kerja Nasional/nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring kinerja Unit Kerja	Kinerja Unit	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
14	Arsitektur dan Informasi Kinerja Kementerian BUMN dan unit kerja Nasional/nasional yang berkaitan dengan Arsitektur dan Informasi Kinerja Kementerian BUMN dan unit kerja.	Arsitektur dan Informasi Kinerja Kementerian BUMN dan unit kerja Nasional/nasional yang berkaitan dengan Arsitektur dan Informasi Kinerja Kementerian BUMN dan unit kerja.	2 tahun	3 tahun	Musnah Kecuali Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
<b>SM. SUMBER DAYA MANUSIA</b>										
01	<b>Penercanaan Sumber Daya Manusia (SDM)</b>									
01	Analisis Jabatan Nasional/nasional yang berkaitan dengan diterjemah ke jabatan atau pekerjaan untuk mendapatkan uraian jabatan atau pekerjaan.	Data Analisis Jabatan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	Penetapan Kebutuhan SDM Nasional/nasional yang berkaitan dengan Arsip yang terkait penetapan kebutuhan Aparatur Stipil Negara	Penetapan Kebutuhan SDM	2 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
03	Formasi Pegawai Nasional/nasional yang berkaitan dengan usulan dan persetujuan Formasi Pegawai ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Formasi Pegawai	2 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

02	<b>Pendelegasi Wewenang</b>									
01	<b>Penetapan Pejabat Pih</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan Pejabat Pelaksana Harian.	Penetapan Pejabat Pih	1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	<b>Penetapan Pejabat Pit</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan Pejabat Pelaksana Tugas.	Penetapan Pejabat Pit	1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
03	<b>Penetapan SDM ASN (PNS)</b> <b>Penetapan SDM</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan, meliputi seleksi administrasi, pemanggilan peserta test, pelaksanaan ujian tertulis,dan wawancara	Pengumuman, soal ujian, daftar hadir, berita acara,	2 tahun, setelah diangkat ASN	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
01	<b>Penetapan Pengumuman Kelulusan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengaduan, meliputi pengumuman setiap tahapan seleksi/test dan kelulusan akhir.	Penetapan Pengumuman Kelulusan	2 tahun, setelah diangkat ASN	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	<b>Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan Kelengkapan Penetapan NIP	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	-	-	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
04	<b>Nota Usul Pengangkatan CASN menjadi ASN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan pengangkatan CASN menjadi ASN	Nota Usul Pengangkatan CASN menjadi ASN	1 tahun, setelah Surat Keputusan (SK) ditetapkan	2 tahun	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
05	<b>Surat Keputusan CASN/ASN Kolektif</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan CASN/ASN Kolektif	Surat Keputusan CASN/ASN Kolektif	2 tahun, setelah Petikan SK ditetapkan	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
06	<b>Berkas Lamaran yang Tidak Diterima</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan lamaran pendidik yang tidak diterima	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	1 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
04	<b>Pengadaan SDM ASN (Non PNS)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan Pegawai non PNS dan Alih Pengetahuan	Pengadaan Pengadaan Pegawai non PNS dan Alih Pengetahuan	1 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
05	<b>Pengadaan Jabatan Pimpinan Tinggi</b>									
01	<b>Jabatan Pimpinan Tinggi Madya</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan Pimpinan Tinggi Madya.	SK pembentukan TIM, Pengumuman, Panitia Seleksi, Daftar Hadir, Bahan Presentasi, Risalah, Surat Pengajuan Calon ke Presiden, Laporan kepada Komisi ASN.	2 tahun, setelah pelantikan	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	<b>Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.	SK pembentukan TIM, Pengumuman, Panitia Seleksi, Daftar Hadir, Bahan Presentasi, Risalah, Surat Pengajuan Calon ke Menteri, Laporan kepada Komisi ASN.	2 tahun, setelah pelantikan	2 tahun	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
03	<b>Berkas Lamaran yang Tidak Diterima</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak diterima.	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
06	<b>Pengembangan Kompetensi SDM</b>									
01	<b>Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan Diklat, Kursus pegawai	Surat Perintah, Surat Tugas, Laporan Pelaksanaan Diklat, Sertifikat Diklat.	1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah kecuali masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	<b>Tuguh Belajar, Izin Belajar</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan Tuguh Belajar, Izin Belajar pegawai	Surat Tugas Belajar, Surat Izin Belajar, ijazah	1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah kecuali ijazah masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
03	<b>Ujian Dinas Pegawai</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan ujian dinas pegawai	Surat Perintah, Surat Tugas, Surat Keterangan Lulus	1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah kecuali Surat Keterangan Lulus masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
04	<b>Asesmen</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen pegawai.	Surat Perintah, Surat Tugas, Laporan Hasil Asesmen.	3 Tahun	2 Tahun	Musnah kecuali hasil asesmen Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
07	<b>Pembinaan SDM</b>									
01	<b>Disiplin Pegawai</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan disiplin pegawai.	Daftar Hadir dan Rekapitulasi Daftar Hadir	1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	<b>Penilaian Prestasi Kerja (PPK) ASN PNS</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja dan perlaku kerja ASN (PNS)	Penilaian Prestasi Kerja (PPK)	1 tahun, setelah penilaian ditetapkan	3 tahun	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
03	<b>Penilaian Prestasi Kerja (PPK) ASN Non PNS/Magang BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Atasan ASN Non PNS terhadap sasaran kerja dan perlaku kerja ASN Non PNS/Magang BUMN.	Laporan Prestasi Kerja	1 tahun, setelah penilaian ditetapkan	3 tahun	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
04	<b>Daftar Usul Penetapan Angka Kredit</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang hasil dari penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan.	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit, Penetapan Angka Kredit	1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah, kecuali SK Penetapan Angka Kredit masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
05	<b>Berkas Hukuman Disiplin/Pemberhentian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi berdasarkan hasil dari dokumentasi pemanggilan, berita acara periksaan dan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin.	Berkas Hukuman Disiplin/Pemberhentian	1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah, kecuali BAP dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
06	<b>Penghargaan dan Tanda Jasa</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.	Penghargaan dan Tanda Jasa	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
08	<b>Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai.	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	1 tahun, setelah memperoleh keputusan tetap	5 tahun	Dinilai kembali, kecuali SK Penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
09	<b>Mutasi</b>									
01	<b>Alih Status, pindah instansi, diperbaikkan, dipekerjakan, Naskah-naskah yang berkaitan dengan segera perubahan mengetahui seseorang ASN seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pensiun, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.</b>	Alih Status, pindah instansi, diperbaikkan, dipekerjakan, Naskah-naskah yang berkaitan dengan segera perubahan mengetahui seseorang ASN seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pensiun, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.	1 tahun, setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Note dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

	<b>Rotasi Kerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan segalai perubahan mengenai seseorang ASN seperti pengangkatan, pemberhentian, pemenuhan, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.	SK Rotasi Kerja	1 tahun, setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
03	<b>Penyesuaian Masa Kerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses untuk mengejutkan masa kerja yang dapat diperlengkapan penuh untuk penafian nilai pokok	SK Penyesuaian Masa Kerja	1 tahun, setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
04	<b>Mutasi Keluarga</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan segalai perubahan mengenai segala perubahan mutasi keluarga ASN.	Surat Izin Pernikahan/Perceraian, Surat Penolakan Izin, Akta Nikah/Cerai, Akta Kelahiran Anak, Surat Keterangan Meninggal Dunia	1 tahun, setelah penetapan	-	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
05	<b>Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi daftar nama pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk mendapatkan dapat diangkat/diberhentikan dalam jabatan struktural tertentu.	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
06	<b>Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi daftar nama pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk mendapatkan dapat diangkat/diberhentikan dalam jabatan fungsional tertentu.	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
07	<b>Usul Kenaikan Pangkat/Golongan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi daftar nama pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pada periode tertentu.	Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
08	<b>Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi daftar nama pegawai yang akan dilakukan perubahan data dasar/status/ kedudukan hukumnya.	Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Surat Persetujuan dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
09	<b>Berkas Baperjaket</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi dalam memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kebijakawain di lingkungan kementerian BUMN	Berkas Baperjaket	1 tahun setelah SK ditetapkan	5 tahun	Musnah kecuali pejabat eselon I Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
10	<b>Pelantikan Pejabat Struktural/JFU</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengesahan pejabat dalam jabatan struktural/umum yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaiwan	Pelantikan Pejabat Struktural/JFU	Masuk Personal File	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
01	<b>Surat Perintah Dinas/Surat Tugas/Curut</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan perintah/arsahan/izin yang diberikan oleh pihak atasan atau instansi kepada bawahan atau angola instansi agar melaksanakan dinas/tugas/izin tertentu yang diberikan atasan	Perintah Dinas/Surat Tugas/Surat Izin	2 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
02	<b>Cuti Besar</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembalian cuti yang dapat diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun secara berturut-turut	Cuti Besar	1 tahun setelah SK ditetapkan	-	Masuk Berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
03	<b>Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti tahunan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan izin cuti pegawai untuk meninggalkan pekerjaan karena alasan yang dapat diterima (sakit, bersalin, menjalankan cuti tahunan)	Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti tahunan	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
04	<b>Cuti Alasan Penting</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembebasan cuti yang diberikan kepada Pegawai karena adanya alasan yang penting.	Cuti Alasan Penting	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
05	<b>Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembalian cuti yang diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus dikarenakan alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak.	Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)	3 tahun setelah pelaksanaan	-	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
06	<b>Dokumentasi Identitas Pegawai</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendataan identitas pribadi PNS dan keluarganya.	usul penetapan karpeg/KPE/Karsu, Keanggotaan Organisasi profesi/kedinasan, Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KPA), Berkas Kepegawaiwan dan Daftar Urut Keangkatan (DUK), LHKPN, LHKASN.	1 tahun setelah penetapan	-	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
11	<b>Kesejahteraan Pegawai</b>							Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses		
01	<b>Gaji, Tunjangan Uang Makan, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Suami/Istri</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan belanja uji pengawal negeri spesial dan pengawal negara satelit.	Gaji	2 tahun	8 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
02	<b>Tunjangan Kinerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan belanja tunjangan kinerja pegawai.	Tunjangan Kinerja	2 tahun	8 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
03	<b>Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan pemeliharaan kesehatan pegawai seperti proses pemerkasaan kesehatan berkala dan medical record	Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	2 Tahun	1 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
04	<b>Registrasi Surat Keterangan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses registrasi surat keterangan PNS Non PNS.	Registrasi Surat Keterangan	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
05	<b>Layanan Asuransi Pegawai/BPJS</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada PNS dalam menjamin jaminan kesehatan bagi PNS Non PNS.	Layanan Asuransi Pegawai/BPJS	2 tahun	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
06	<b>Layanan Tabungan Perumahan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan bantuan dana dari hasil pemupukan yang diberikan kepada dikenakan kepada pegawai oleh PNS dalam memenuhi ketebutan uang muka pembelian rumah sejaterah melalui kredit/pembelian pemilikan rumah atau kredit/pembelian membangun rumah diatas tanah sendiri, termasuk untuk biaya-biaya terkait kredit/pembelian rumah atau yang dipersyaratkan oleh bank.	Layanan Tabungan Perumahan	2 tahun	-	Permanen sampai pensiun	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

	<b>Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan kepada pegawai dan waris PNS yang meninggal karena dinas yang terdiri atas Gaji Terusan, Jamuan Kematian, Asuransi Kematian/Askes (HT), Asuransi Dwiguna (HT'), Pensiun Janda/Duda/Anak, Pengembalian Uang Taperum PNS.	Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas	2 tahun	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	<b>Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	2 tahun	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	<b>Layanan Olahraga dan Rekreasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan bentuk kekompatifitasan untuk berolahraga dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Layanan Olahraga dan Rekreasi	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	<b>Layanan Kesejahteraan Lain (fasilitas kredit)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada PNS untuk memperoleh surat keterangan dari instansi dalam rangka mendapatkan fasilitas dari pihak tertentu.	Layanan Kesejahteraan Lain (fasilitas kredit)	2 tahun	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
12	<b>Perselisihan/Sengketa Kepegawaian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	1 tahun setelah memperoleh keputusan yang bersifat tetap	2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
13	<b>Penugasan Pegawai Kementerian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penugasan pegawai Kementerian BUMN sebagai Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas/Organ Dewan Komisaris di BUMN/Anak Perusahaan BUMN	Penugasan Pegawai Kementerian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
14	<b>Pemberhentian Pegawai/Pensiun</b>									
	<b>Pemberhentian dengan Hormat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan hormat.	SK Pemberhentian dan SK Pensiun.	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	<b>Pemberhentian dengan tidak Hormat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat.	SK Pemberhentian.	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	<b>Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Jandanya/Dudanya &amp; PNS</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses usulan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/jandanya/dudanya dan ASN yang meninggal.	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Jandanya/Dudanya & PNS yang meninggal	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
15	<b>Magang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan Magang SMA/SMK/ atau mahasiswa atau pegawai dari perusahaan lain	Magang	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
16	<b>Personal File/Office Automation</b>									
	<b>Lamaran</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas lamaran	Lamaran	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon I lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	<b>Nota persetujuan/pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKSN)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Nota persetujuan/pertimbangan Kepala BKN	Nota persetujuan/pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon I lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	<b>Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS/CASN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengangkatan CPNS/CASN.	Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS/CASN	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon I lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	<b>Hasil pengujian kesehatan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil pengujian kesehatan.	Hasil pengujian kesehatan	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon I lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	<b>Copy kartu pegawai (KARPEG)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan copy KARPEG.	Copy kartu pegawai (KARPEG)	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon I lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	<b>SK kenaikan gaji berkala</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK kenaikan gaji berkala.	SK kenaikan gaji berkala	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon I lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

07	<b>Surat pernyataan melaksanakan tugas/mendukung jabatan/surat pernyataan pelantikan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas/mendukung jabatan/surat pernyataan pelantikan.	Surat pernyataan melaksanakan tugas/mendukung jabatan/surat pernyataan pelantikan	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
08	<b>SK pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional.	SK pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
09	<b>SK perpindahan wilayah kerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK perpindahan wilayah kerja.	SK perpindahan wilayah kerja	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
10	<b>SK perpindahan antar instansi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK perpindahan antar instansi.	SK perpindahan antar instansi	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
11	<b>SK peninjauan masa kerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK peninjauan masa kerja.	SK peninjauan masa kerja	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
12	<b>SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK CTLN.	SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN)	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
13	<b>Berita acara pemeriksaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan berita acara pemeriksaan.	Berita acara pemeriksaan	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
14	<b>SK hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS/ASN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS/ASN.	SK hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS/ASN	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
15	<b>SK perbantuan kepala daerah otonom/instansi lain</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK perbantuan kepala daerah otonom/instansi lain.		1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
16	<b>SK penarikan kembali dari perbantuan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK penarikan kembali dari perbantuan.	SK penarikan kembali dari perbantuan	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
17	<b>SK pemberian uang tunggu</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pemberian uang tunggu.	SK pemberian uang tunggu	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
18	<b>SK pemberhentian sebagai PNS/ASN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pemberhentian sebagai PNS/ASN.	SK pemberhentian sebagai PNS/ASN	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

19	<b>SK pemberhentian sementara</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pemberhentian sementara.	SK pemberhentian sementara	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
20	<b>SK pengangkatan/pemberhentian sebagai Pejabat Negara</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengangkatan/pemberhentian sebagai Pejabat Negara.	SK pengangkatan/pemberhentian sebagai Pejabat Negara	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
21	<b>SK pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara.	SK pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
22	<b>SK pengalihan PNS/ASN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengalihan PNS/ASN.	SK pengalihan PNS/ASN	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
23	<b>Surat keterangan pernyataan hilang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan pernyataan hilang.	Surat keterangan pernyataan hilang	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
24	<b>Surat kembalinya PNS yang dinyatakan hilang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat kembalinya PNS yang dinyatakan hilang.	Surat kembalinya PNS yang dinyatakan hilang	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
25	<b>SK penggantian nama</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK penggantian nama.	SK penggantian nama	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
26	<b>Surat perbaikan tanggal tahun kelahiran PNS/ASN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat perbaikan tanggal tahun kelahiran PNS/ASN.	Surat perbaikan tanggal tahun kelahiran PNS/ASN	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
27	<b>Isian formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Isian formulir PUPNS.	Isian formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS)	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
28	<b>Berita acara pengambilan sumpah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan berita acara pengambilan sumpah.	Berita acara pengambilan sumpah	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
29	<b>Penetapan angka kredit</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan angka kredit.	Penetapan angka kredit	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
30	<b>Surat tugas/izin belajar dalam/luar negeri</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat tugas/izin belajar dalam/luar negeri.	Surat tugas/izin belajar dalam/luar negeri	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

	<b>SK kenaikan pangkat penyesuaian ijazah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.	SK kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
31	<b>Surat izin menjadi anggota Partai Politik (Parpol)/Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat izin menjadi anggota Parpol/Ormas/LSM.		1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
32	<b>Surat pencabutan izin menjadi anggota Parpol</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat pencabutan izin menjadi anggota Parpol.	Surat pencabutan izin menjadi anggota Parpol	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
33	<b>Surat keterangan meninggal dunia/hilang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan meninggal dunia/hilang.	Surat keterangan meninggal dunia/hilang	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
34	<b>Surat keterangan mutasi keluarga</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan mutasi keluarga.	Surat keterangan mutasi keluarga	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
35	<b>Surat keterangan peningkatan pendidikan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan peningkatan pendidikan.	Surat keterangan peningkatan pendidikan	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
36	<b>Surat keterangan hasil penelitian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan hasil penelitian khusus.	Surat keterangan hasil penelitian khusus	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
37	<b>Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala.	Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
38	<b>Surat izin berpergian ke luar negeri</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat izin berpergian ke luar negeri.	Surat izin berpergian ke luar negeri	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
39	<b>Kartu induk PNS/ASN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kartu induk PNS/ASN.	Kartu induk PNS/ASN	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
40	<b>SK penempatan/penarikan pegawai</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK penempatan/penarikan pegawai.	SK penempatan/penarikan pegawai	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
41	<b>SK penarikan kembali dari perbaungan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK penarikan kembali dari perbaungan.	SK penarikan kembali dari perbaungan	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
42	<b>SK penarikan kembali dari perbaungan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK penarikan kembali dari perbaungan.	SK penarikan kembali dari perbaungan	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

	<b>SK pertimbangan status PNS/ASN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pertimbangan status PNS/ASN.	SK pertimbangan status PNS/ASN	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
43	<b>SK persetujuan/pengusahan kembali cuti di luar tanggungan negara</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK persetujuan/pengusahan kembali CTLN.	SK persetujuan/pengusahan kembali cuti di luar tanggungan negara	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
44	<b>Surat keterangan pengunduran diri/diberhentikan sebagai PNS/ASN karena menjadi pengurus/anggota Parpol</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan pengunduran diri/diberhentikan sebagai PNS/ASN, karena menjadi pengurus/anggota Parpol.	Surat keterangan pengunduran diri/diberhentikan sebagai PNS/ASN karena menjadi pengurus/anggota Parpol	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
45	<b>SK pensiun</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pensiun.	SK pensiun	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
17	<b>Berkas Menteri/Wakil Menteri Sebagai Pejabat Negara</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Berkas Menteri/Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara	Berkas Menteri/Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara	1 Tahun tidak menjabat	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
<b>OR.ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI</b>										
01	<b>Organisasi</b>	Organisasi								
01	<b>Struktur Organisasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Menteri mengenai Rancangan Perpres tentang Kementerian BUMN	Penetapan Struktur Organisasi	1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Sekretariat Kementerian BUMN
02	<b>Evaluasi Organisasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi organisasi Kementerian BUMN	Laporan hasil evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN		Sekretariat Kementerian BUMN
03	<b>Penetapan Portofolio BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keputusan Menteri/atau Nama Menteri terkait penetapan portofolio BUMN	Penetapan Portofolio BUMN	1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Sekretariat Kementerian BUMN
02	<b>Informasi Jabatan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum.	SK Informasi Jabatan	1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Penetapan Informasi Jabatan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Sekretariat Kementerian BUMN
03	<b>Evaluasi Jabatan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum, dan Peraturan Menteri BUMN tentang Grading	Peraturan Menteri Evaluasi Jabatan	1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Peraturan Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Sekretariat Kementerian BUMN
04	<b>Analisis Beban Kerja (ABK)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum, dan Surat Keputusan tentang Analisis Beban Kerja (ABK).	Analisis Beban Kerja (ABK)	1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Penetapan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Sekretariat Kementerian BUMN
05	<b>Penetapan/Penyalarasan SOP</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Usulan SOP Unit, Pembahasan SOP, Pengesahan SOP, Mekanisme Kerja/Tata hubungan kerja, dan Evaluasi atas Implementasi SOP.	SOP	1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Penetapan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Sekretariat Kementerian BUMN
06	<b>Reformasi Birokrasi</b>									
01	<b>Pelaksanaan Program RB</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Road Map RB, Program Tahunan RB, SK Tingkat ND, Risalah Rapat, dan Laporan Pelaksanaan Program dan Monitoring RB.	Road Map Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan Program RB	1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Kebijakan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Sekretariat Kementerian BUMN
02	<b>PENILAIAN PMPRB</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.	PMPRB	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Sekretariat Kementerian BUMN
<b>UM. UMUM</b>										
01	<b>Perencanaan dan Realisasi Pengadaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen RUP (Rancangan Umum Pengadaan) rencana pengadaan dalam satu tahun ke depan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kerangka Acuan Pengadaan Jasa (KAPJ) yang telah disampaikan oleh Pejabat Pembut Komitmen (PPK), dan daftar realisasi pengadaan	Perencanaan dan Realisasi Pengadaan	2 Tahun	8 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
02	<b>Pengadaan Barang dan Jasa</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pengadaan barang dan jasa	Note pembiayaan barang dan jasa dan PPK kepada kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perikiran Sendiri (HPS) yang merupakan dokumentasi klasifikasi awal, Rancangan Kontrak, Undangan, Notulen, Daftar Hadir terkait pengadaan, Dokumen Prakualifikasi, Dokumen Pemilihan, Dokumen Penawaran yang disubmit oleh calon penyedia, dokumen pengadaan yang memuat tentang syarat-	2 Tahun	8 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
03	<b>Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)</b>	Penatausahaan Barang Milik Negara	2 tahun	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
01	<b>Penatausahaan Barang Milik Negara</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP), Penggunaan Sementara Gedung dan Inventarisasi, dokumentasi usulan penetapan penggunaan barang, dokumentasi penetapan penggunaan barang milik negara, Bantuan dan Pengadaan Buku Inventaris, Berita Acara Inventarisasi BMN, Dokumen Laporan BMN, Dokumen Laporan Persediaan, Perjanjian Penggunaan Sementara, Usulan Penggunaan Sementara	Penatausahaan Barang Milik Negara	2 tahun	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas

	<b>Pemanfaatan BMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendaftaranan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan untuk penyampaian dan dilaksanakan fungsi Kementerian dan/atau optimasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan yang terdiri dari Permohonan Pemanfaatan oleh Pihak ekster, Usulan Pemanfaatan, Persetujuan Pemanfaatan, Perjanjian pemakaian/BAST Pemanfaatan, Addendum Perjanjian Pemanfaatan, Laporan Hasil Pemanfaatan	Pemanfaatan BMN	1 Tahun setelah Perjanjian Berakhir	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
02	<b>Pemindahtempahan/Penghapusan Barang Milik Negara</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemindahtempahan baik berupa penghapusan, hibah maupun cemursubahan	Usulan Pemindahtempahan dan Penghapusan, Dokumen Pinjaman Pakai, Berita Acara Penetapan Limit, Persetujuan Pemindahtempahan, Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima (BAST) Pemindahtempahan, Keputusan Penghapusan, Laporan Lelang	2 Tahun	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
03	<b>Monitoring Nasional</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan tapiran penggunaan listrik dan air oleh tenant maupun tagihan atas sewa menyewa	Rencana /Target PNBP, Rekapitulasi Realisasi PNBP, Laporan Realisasi PNBP, Surat Tagihan atas Pemanfaatan, Bukti Pembayaran atas Pemanfaatan.	1 Tahun setelah Perjanjian Berakhir	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
04	<b>Distribusi Barang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pendistribusian BMN kepada unit kerja (RAST BUMN)	Surat Permintaan/Bon Permintaan, Rekapitulasi Distribusi, Berita Acara Pinjam Pakai, Daftar Inventaris Ruangan/Daftar Inventaris Lainnya, Kartu Inventaris Barang	2 tahun setelah audit	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
05	<b>Pengelolaan Gudang (nota penyampaian dan daftar barang rusak)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan daftar barang rusak yang didalamnya terdapat berkas form penarikan Barang Milik Negara.	Pengelolaan Gudang (nota penyampaian dan daftar barang rusak)	2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
06	<b>Pengamanan Aset Tanah dan Gedung</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan Sertifikat Tanah dan Gedung, Bukti penilaian tanah dan gedung	Sertifikat Tanah dan Gedung, Bukti penilaian tanah dan gedung	Selema aset Masih Dimiliki	1 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
04	<b>Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan gedung berupa laporan pengelolaan gedung maupun nota	Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung	2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
05	<b>Penyediaan Ruang Rapat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan permoohonan peminjaman ruang rapat serta ijadwalnya	Penyediaan Ruang Rapat	2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
07	<b>Pelayanan Jasa Listrik, Telepon dan Air</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan tagihan atas pemakaian listrik, telepon, air serta bukti pembayarannya	Pelayanan Jasa Listrik, Telepon dan Air	2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
08	<b>Penyediaan Konsumsi Rapat dan Akomodasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan Konsumsi rapat serta akomodasi terkait surat perintah konsumsi, Undangan rapat, absensi hadir, serta kwitansi pembayaran.	Penyediaan Konsumsi Rapat dan Akomodasi	2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
09	<b>Penggunaan Kendaraan Dinas</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan penggunaan Bahan bakar, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas, peminjaman kendaraan dinas, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas, laporan kerusakan kendaraan dinas.	laporan penggunaan Bahan bakar, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas, peminjaman kendaraan dinas, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas, laporan kerusakan kendaraan dinas.	2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
10	<b>Layanan Keamanan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelemparan kegiatan pengamanan temusuk parkir dan perintiran tamu	Buku formulir tamu, kartu parkir, kartu akses	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
11	<b>Layanan Rumah Tangga Lainnya (ID Card, infocus)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemohonan surat masuk dan surat keluar, serta arsip pemohonan pembuatan ID Card dan berita acara serah terimanya	Layanan Rumah Tangga Lainnya (ID Card, infocus)	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
12	<b>Layanan Pakaian Dinas</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan pakaian dinas yang didalamnya terdapat berkas ukuran pegawai.	Daftar ukuran pakaian dinas pegawai	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
<b>TU. TATA USAHA</b>										
01	<b>Administrasi Persuratan</b>									
01	<b>Buku agenda (analog atau digital) surat masuk dan surat keluar</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengagendaan surat masuk dan surat keluar	Buku Agenda surat	2 tahun	3 tahun	dinilai kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
02	<b>Buku ekspedisi/anda terima surat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi persuratan	Buku Ekspedisi	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
02	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis</b>									
01	<b>Pembinaan Sistem</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan dinamis meliputi petunjuk pelaksanaan kearsipan dan persetujuan JRA	SOP, Peraturan Menteri, SK	Selema masih berlaku	2 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
02	<b>Pembinaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan dinamis meliputi bimbingan teknis kearsipan, apresiasi/sosialisasi/ penyuluhan, supervisi kearsipan, penilaian jabatan fungsional arsiparis, lomba terbit arsip.	Materi Pembinaan dsb	Selema masih berlaku	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
03	<b>Monitoring Nasional</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring pengelolaan arsip dinamis di lingkungan unit kerja kementerian BUMN.	Laporan Hasil Monitoring	Selema masih berlaku	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
03	<b>Pengelolaan Arsip Inaktif</b>									
01	<b>Penataan, Penyimpanan, Pemeliharaan dan Pengolahan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip inaktif mulai dari penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.	Daftar arsip inaktif	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
02	<b>Peminjaman Arsip</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman arsip inaktif di unit kerja.	Buku peminjaman/ formulir peminjaman	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
04	<b>Pemusnahan Arsip</b>									
01	<b>Pemindahan Arsip Inaktif</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip	Berita acara pemindahan dan daftar arsip yang dipindahkan	Selema masih berlaku	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
02	<b>Pemusnahan Arsip yang tidak ber nilai guna</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip.	daftar arsip usul musnah, berita acara pemusnahan, SK lim pemusnahan arsip, rekomendasi/pertimbangan pemusnahan arsip, dan surat keputusan pemusnahan.	2 tahun	3 tahun	Permanen kecuali fisik arsip musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
03	<b>Penerusan Arsip Status</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerusan arsip	Daftar arsip yang diserahkan, berita acara serah terima arsip	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas

05	<b>Perpusatakaan dan Dokumentasi</b>								
01	<b>Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan koleksi dan pengolahan bahan pustaka perpusatakaan Kementerian BUMN	Buku Induk Koleksi, Daftar buku dalam pemesanan, Daftar buku dasar pengadaan, Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah, Lembar kerja pengolahan shelf list/ Jajaran Kartu Utama (master list), Daftar tambahan Buku (Assesmen list).	1 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Musnah kecuali buku induk koleksi Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses
02	<b>Layanan Jasa Perpusatakaan dan Informasi Data</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan jasa dan informasi data yang diberikan perpusatakaan Kementerian BUMN	Data tamu/peminjaman, buku peminjaman, kartu peminjaman dan inventaris buku, data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka dan pemeliharaan, Bedah buku.	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses
03	<b>Pemeliharaan Bahan Pustaka</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan bahan pustaka di lingkungan Kementerian BUMN	Laporan kondisi bahan pustaka dan reografi bahan pustaka	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses
04	<b>Pembinaan Perpusatakaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan perpusatakaan yang meliputi pengelolaan perpusatakaan, pengembangan SDM, pengembangan sarana dan prasarana, kerjasama dan jaringan perpusatakaan, pengembangan minat baca.	Laporan kegiatan pembinaan	1 tahun	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses
<b>KU. KEUANGAN</b>									
01	<b>Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran Kusus Pengguna Anggaran (KPA), dan Internal Kementerian BUMN terkait Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	Kebijakan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Keuangan Negara, Surat dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran	2 Tahun setelah KPA tidak menjabat	4 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses
02	<b>Pendapatan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Realisasi Pendapatan	Surat Setoran Pajak (SSP) dan Buktি Setornya, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Buktি Setornya, Surat Setor Bea dan Cukai (SSBC), Buktি setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), Buktি Setor Sisa Anggaran Lebih atau Buktি Setor Pengembalian Belanja, Buktি Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank dsb.	2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses
03	<b>Belanja/Pengeluaran Anggaran</b>								
01	<b>Dokumen Pembayaran Keuangan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran baik yang dilakukan oleh Badan Pengeluaran maupun mekanisme pengelolaan DIPA APBN Rutin dan PMN sampai dengan semua berkas pengajuan pencarian dana sampai terbitnya surat perintah pencarian dana (SP2D)	Pengajuan kebutuhan penarikan kas, bukti bukti tagihan dari pihak ketiga, surat permintaan pembayaran (SPP) LS, surat perintah membayar (SPM) LS, surat perintah pencarian dana (SP2D) LS Pencarian atas DIPA Penyertaan Modal Negara (PMN)	2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai kembali kecuali Pencarian berkaitan dengan PMN Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses
02	<b>Uang Persediaan (UP)/Tambahan UP</b> Arsip yang berkaitan dengan belanja yang ditbayarkan oleh Badan Pengeluaran menggunakan uang persediaan yang dikelola	Bukti bukti tagihan dari pihak ketiga, surat permintaan pembayaran (SPP) GU, surat perintah membayar (SPM) GU, surat perintah pencarian dana (SP2D) GU	2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses
03	<b>Pembukuan Perpendaharaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembukuan Benda/Bahan Pengeluaran.	Pembukuan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara, Buku Kas Umum, Tunjangan Kinerja, Buktі Potong/SPT (PPh 21, PPh 22, PPh 23)	2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses
04	<b>Dokumen Akuntansi Keuangan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pencatatan transaksi penggunaan anggaran	Draft/Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium Kartu Gaji dan laporan Kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional Berita Acara Pemerintahan Kas/Kas/Register Penitipan Kas Arsip Data Komputer (ADK) Berita Acara Rekonsiliasi Antara Satuan Kerja dan KPPN	2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses
05	<b>Laporan Keuangan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Kementerian BUMN.	Laporan Keuangan Realisasi APBN (BA. 041) dan Laporan Realisasi PMN (BA. 999.03) terdiri dari : Neraea Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan (Cat. K)	2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses
04	<b>Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara</b>								
01	<b>Tuntutan Perpendaharaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan tuntutan atas pengelolaan perpendaharaan	Tuntutan Perpendaharaan	2 tahun setelah tagihan tuntutan perpendaharaan pertama kali dituntut dan rugi ditunsi	Permanen	Terbatas	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
02	<b>Tuntutan Ganti Rugi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan tuntutan ganti rugi	Tuntutan Ganti Rugi	2 tahun setelah tagihan tuntutan perpendaharaan tuntutan ganti rugi ditunsi	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen	Penentu Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
05	<b>Laporan Monitoring dan Evaluasi anggaran</b> Arsip yang berkaitan dengan kegiatan laporan monitoring dan evaluasi anggaran	Laporan monitoring dan evaluasi	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses
<b>HM. HUBUNGAN MASYARAKAT</b>									
01	<b>Hubungan dengan media massa</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberitan artikel, bulletins, press conferences, dokumentasi audiovisual, pemberitan informasi website, media sosial, dll.	Artikel, bulletins, press conferences, dokumentasi audiovisual, pemberitan informasi website, media sosial, dll.	1 tahun	2 tahun	Musnah Kecuali Dokumentasi Kegiatan Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses
02	<b>Pameran</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pameran, festival, sambutan dsb.	Laporan pelaksanaan pameran.	1 tahun	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses
03	<b>Hubungan antar Lembaga dan Masyarakat</b>								
01	<b>Hubungan dengan DPR/DPD/MPR</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat pimpinan dengan DPR/DPD/MPR baik Hearing/Rapat Kerja/Koordinasi DPR.	Undangan, Surat Dinas, Daftar Pertanyaan DPR, Bahan presentasi/Jawaban atas pertanyaan DPR.	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses
02	<b>Kunjungan Kerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kunjungan kerja DPR bersama pimpinan	Laporan Kunjungan Kerja.	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses
03	<b>Hubungan dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar instansi baik dalam maupun di luar	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali isu strategis Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Biro Umum dan Humas
04	<b>Hubungan dengan organisasi sosial (LSM)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan organisasi kemasyarakatan	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Biro Umum dan Humas
05	<b>Hubungan dengan BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga dengan BUMN	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali isu strategis Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Biro Umum dan Humas
06	<b>Hubungan dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Swasta</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Swasta	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan	1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Biro Umum dan Humas

	07	<b>Hubungan antar Negara, Organisasi Internasional</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan Lembaga dengan Negara lain dan organisasi internasional	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Negara lain dan organisasi internasional	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali isu strategis Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
04		<b>Pemenuhan Informasi publik/PPID</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemenuhan informasi publik	Surat/Data	1 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
05		<b>Pengaduan / Aspirasi Masyarakat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan unjuk rasa, pengaduan masyarakat dan presepsi publik	Surat/Data	1 tahun	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
06		<b>Keprotokolan</b> <b>Penyelenggaraan Acara Kedinasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokol acara kedinasan	Penyelenggaraan acara kedinasan	1 tahun	2 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
01	02	<b>Agenda Kegiatan Pimpinan Lembaga</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, perjadwalan dan pelaksanaan agenda pimpinan.	Agenda Kegiatan Pimpinan Lembaga	1 tahun	1 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
03		<b>Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri</b> Arsip yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri pimpinan lembaga/instansi atau pejabat lainnya	Undangan, Laporan, Daftar Hadir	2 tahun	1 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
04		<b>Upacara dan Acara Kementerian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial menteri lainnya	Undangan , Daftar Hadir, Berita Acara, foto dsb.	1 tahun	1 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
05		<b>Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan perjalanan dinas dalam dan luar negeri pimpinan	Tiket, Paspor, dan Visa.	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Umum dan Humas
		<b>HK. HUKUM</b>									
01		<b>Program Legislasi Lembaga/Instansi</b> Naskah-naskah yang terkait dengan penertiban peraturan perundang-undangan	Usulan program legislasi dari Kementerian BUMN	2 Tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
02		<b>Produktuk hukum</b> <b>Undang-undang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang.	Kajian, Naskah Akademik, Rancangan Undang-undang, Keputusan Pembentukan PAK, Undangan dan Risalah/Transkip Rapat Pembahasan Internal, Panitia Antar Kementerian, Harmonisasi, DPR), sampai diundangkan dan permintaan salinan	1 Tahun setelah diundangkan	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
01		<b>Peraturan Pemerintah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan pemerintah.	Kajian, Rancangan Peraturan Pemerintah, Keputusan Pembentukan PAK, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan (Internal, Panitia Antar Kementerian, Harmonisasi), sampai ditetapkan Peraturan Pemerintah dan permintaan salinan	1 Tahun setelah ditetapkan	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
02		<b>Peraturan Presiden</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan presiden.	Kajian, Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Pembentukan PAK, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan (Internal, Panitia Antar Kementerian, Harmonisasi), sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden dan permintaan salinan	1 Tahun setelah ditetapkan	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
03		<b>Peraturan Presiden</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan presiden.	Kajian, Keputusan Pembentukan TM, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan (Internal Konseptor, Antar Unit, dengan BUMN), sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri BUMN dan permintaan salinan	1 Tahun setelah ditetapkan	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
04		<b>Peraturan Presiden</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan presiden.	Kajian, Keputusan Pembentukan TM, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan (Internal Konseptor, Antar Unit, dengan BUMN), sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri BUMN dan permintaan salinan	1 Tahun setelah ditetapkan	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
05		<b>Keputusan Presiden</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan Keputusan Presiden	Kajian, Nota Dinas dan Surat Pengusulan, Rancangan Keputusan Presiden, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan, Keputusan Presiden dan permintaan salinan	1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
06		<b>Keputusan Menteri BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Keputusan Menteri BUMN.	Kajian, Nota Dinas dan Surat Pengusulan, Rancangan Keputusan Menteri BUMN, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan, Keputusan Menteri BUMN dan permintaan salinan	1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
07		<b>Instruksi Presiden</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Instruksi Presiden.	Kajian, Nota Dinas dan Surat Pengusulan, Rancangan Instruksi Presiden, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan, Instruksi Presiden dan permintaan salinan	1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
08		<b>Instruksi Menteri</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Instruksi Menteri	Kajian, Nota Dinas dan Surat Pengusulan, Rancangan Instruksi Menteri BUMN, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan, Instruksi Menteri BUMN dan permintaan salinan	1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
09		<b>Surat Edaran Presiden</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Edaran Presiden Republik Indonesia.	Surat Edaran Presiden Republik Indonesia.	1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
10		<b>Surat Edaran Menteri BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Edaran Menteri BUMN.	Kajian, Nota Dinas dan Surat Pengusulan, Konsep Surat Edaran, Surat Edaran.	1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Didikai kembali kecuali Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
11		<b>Note Kesepahaman / Memorandum of Understanding / Kontrak / Perjanjian Kerjasama</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perjanjian kerjasama	Note Kesepahaman / Memorandum of Understanding / Kontrak / Perjanjian Kerjasama	1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Note dampak yang dapat meningkatkan pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
12		<b>Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Selain Peraturan, Nota Dinas dan Surat Laporan kepada JDIH Pusat termasuk peraturan undangan yang dicipta dari instansi lain.	Data Jaringan dokumentasi informasi hukum	1 Tahun setelah diperbarui	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
13		<b>Keputusan/Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Nota Dinas Pengusulan, Konsep Surat Edaran, Surat Edaran.	Keputusan/Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN	1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
03		<b>Bantuan Hukum</b>									
01		<b>Perkara Perdata</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penanganan perkara perdata di lembaga peradilan umum, dimulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat peninjauan kembali	Relas, Surat Kuasa Khusus Mewakili Menteri, Akta Perdamaihan Dalam Sidang, Gugatan, Jawaban Gugatan, Replik, Duplik, Pembuktian, Keputusan Putusan Pengadilan Negeri, Banding, Kontra Memori Banding, Putusan Pengadilan Tinggi, Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Putusan Kasasi, Peninjauan Kembali, Memori PK, Kontra Memori PK, Putusan PK	2 Tahun setelah Inkrah	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
02		<b>Perkara Pidana/Pendampingan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pendampingan perkara pidana yang dilakukan pegawai atau pejabat di Kementerian BUMN di tingkat Perkudikan	(BAP Penyiahan Dokumen, Surat Penggilan Saksi)	2 Tahun setelah Inkrah	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum
03		<b>Perkara Tata Ushaha Negara/TUN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penanganan perkara perdata di lembaga peradilan umum, dimulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat peninjauan kembali	Relas, Surat Kuasa Khusus Mewakili Menteri, Akta Perdamaihan Dalam Sidang, Gugatan, Jawaban Gugatan, Replik, Duplik, Pembuktian, Keputusan Putusan Pengadilan Negeri, Banding, Kontra Memori Banding, Putusan Pengadilan Tinggi, Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Putusan Kasasi, Peninjauan Kembali, Memori PK, Kontra Memori PK, Putusan PK	2 Tahun setelah Inkrah	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Biro Hukum

	04	<b>Perkara Arbitrase</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penanganan perkara yang bersifat khusus di luar Pengadilan	Berkas Perkara	2 Tahun setelah Inkrah	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Hukum
	05	<b>Perkara Pengadian Khusus</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penanganan perkara yang bersifat khusus, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan terkait jasa pengadilan	Berkas Perkara Pengadian Khusus	2 Tahun setelah Inkrah	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Hukum
	06	<b>Keterangan Ahli</b> Arsip yang berkaitan dengan pendampingan dalam rangka pemberian keterangan ahli dalam perkara pidana di tingkat penidikan	Surat Penggalian Pemberian Keterangan Ahli, BAP Keterangan Ahli di Kepolisian/Kejaksaan/KPK	2 Tahun setelah Inkrah	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Hukum
	07	<b>Dukungan Hukum</b> Arsip yang berkaitan dengan dukungan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh BUMN	Surat permohonan dukungan hukum dari BUMN, dan surat tanggapannya/dukungan hukum dari Kementerian BUMN	2 Tahun setelah Inkrah	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Biro Hukum
04		<b>Penyuluhan hukum dan Pembinaan Kesiadaman</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyuluhan terkait atas hal-hal mengenai BUMN, khususnya yang berkaitan dengan penanganan hukum baik di dalam proses perdamaian, pidana, Tata Usaha Negara (TUN), dan sebagainya.	notulensi, bahan seminar/sosialisasi	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN		Biro Hukum
05		<b>Kebijakan umum Anggaran Dasar BUMN dan Perubahannya</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Anggaran Dasar BUMN seperti Anggaran Dasar (AD) BUMN dalam bentuk AD yang di notarikan (Persero), Peraturan Pemerintah (PP) tentang pendirian BUMN (Perum), Perubahan AD BUMN.	Nota, Konsep dan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran Dasar	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN		Asdep Layanan Hukum
<b>IA. INTERNAL AUDIT (INSPEKTORAT)</b>											
01		<b>Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)</b> Arsip yang berkaitan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	2 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN		Inspektorat
02		<b>Pelaksanaan Pengawasan</b>									
01		Laporan Hasil Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Audit Kinerja Kementerian, audit dengan tujuan tertentu), Laporan Hasil Review (review laporan keuangan Kementerian BUMN, reviu RKAKL, reviu RKA BUN), Laporan Evaluasi (evaluasi sistem AKIP-SAKIP, evaluasi sistem APB-BAP, evaluasi penerapan SPPI), Monitoring dan Aksesiensi (LHPB BPK, LHP Inspektorat/UPG dkk), Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yang memerlukan tindak lanjut (TL)	Laporan Hasil Pengawasan	2 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Inspektorat
02		Laporan Hasil Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Audit Kinerja Kementerian, audit dengan tujuan tertentu), Laporan Hasil Review (review laporan keuangan Kementerian BUMN, reviu RKAKL, reviu RKA BUN), Laporan Evaluasi (evaluasi sistem AKIP-SAKIP, evaluasi LKIP Eselon I, evaluasi penerapan SPPI), Monitoring dan Aksesiensi (LHPB BPK, LHP Inspektorat/UPG dkk), Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)	Laporan Hasil Pengawasan	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Inspektorat
03		Audi Investigasi yang mengandung unsur Tindak Pidana Kecil (TPK) dan Korupsi yang tidak tuntas	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI)	2 tahun setelah keputusan akhir/penyelesaian/ keluatan hukum tetap	3 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Inspektorat
04		Monitoring dan Aksesiensi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Aksesiensi	Monitoring dan Aksesiensi (LHPB BPK, LHP Inspektorat/UPG dkk)	1 tahun setelah tindak lanjut selesai	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Inspektorat
05		Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.	Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.	1 tahun setelah tindak lanjut selesai	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Inspektorat
03		<b>Pengawasan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (termasuk Whistle Blowing System)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Diksi/Struktur tugas menteri BUMN, Sekretaris Menteri, Kertas Kerja, dan Laporan	Pengawasan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (termasuk Whistle Blowing System)	2 tahun setelah tindak lanjut selesai	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Inspektorat
<b>II. TEKNOLOGI INFORMASI</b>											
01		<b>Kebijakan dan Perencanaan TI</b>									
01		Master Plan TI Naskah-naskah yang berkaitan dengan Master Plan TI.	Enterprise Architecture, IT Governance and High Level IT Program Road Map & High Level IT Spending Plan beserta undangan dan risalah rapat, dokumen hasil assessment dan peraturan menteri	2 tahun setelah tidak dipergunakan	5 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
02		<b>Kebijakan terkait aplikasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi terkait aplikasi, arsip kebijakan aplikasi berupa prosedur/SOP terhadap aplikasi yang ada di BUMN, arsip koordinasi penyajian content (isi) website (portala), arsip koordinasi penyajian content (isi) website (portala), arsip koordinasi pengelaruan content (isi) website (portala)	Kebijakan terkait aplikasi	2 tahun	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
03		Kebijakan terkait Infrastruktur Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi kebijakan terkait infrastruktur, arsip kebijakan infrastruktur berupa Prosedur/SOP terkait Infrastruktur yang ada di BUMN, arsip koordinasi pembangunan infrastruktur, arsip koordinasi pengembangan infrastruktur dan arsip koordinasi pemeliharaan infrastruktur	Kebijakan untuk infrastruktur	2 tahun	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
02		<b>Aplikasi Berbasis Elektronik</b>									
01		<b>Pembangunan Aplikasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi pembangunan aplikasi	Kesepakatan dengan User terkait pembangunan aplikasi baru, perbaikan atas catatan user, perubahan kebutuhan terhadap aplikasi dan penambahan fitur pada aplikasi dan arsip pembangunan aplikasi	2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
02		<b>Pengembangan Aplikasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi pembangunan aplikasi dan arsip pengembangan aplikasi	Pengembangan Aplikasi	2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
03		<b>Pemeliharaan Aplikasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi pemeliharaan aplikasi berupa kesepakatan dengan User terkait dengan pemeliharaan aplikasi	Laporan perbaikan atas catatan user, perubahan kebutuhan terhadap aplikasi dan penambahan fitur pada aplikasi	2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI

	04	Manual Penggunaan Aplikasi Nasional-nasional yang berkaitan dengan Petunjuk penggunaan aplikasi oleh User Final	Manual Penggunaan Aplikasi	2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	05	Pengolahan, perawatan, dan Monitoring Database Nasional-nasional yang berkaitan dengan catatan/log aktivitas monitoring pengelolaan database	Pengolahan, perawatan, dan Monitoring Database	2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
03		Infrastruktur								Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	
	01	Data Center (Server, Firewall, UPS, AC Presisi, EMS, Vesda)	Data - data terkait Data Center (Server, Firewall, UPS, AC Presisi, EMS, Vesda)	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	02	Hardware (Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Infokus, IP Phone)	Data - data terkait Hardware ( Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Infokus, IP Phone)	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	03	Software (Lisensi, OS, DB, Anti Virus, Software Pendukung)	Data - data terkait Software (Lisensi, OS, DB, Anti Virus, Software Pendukung)	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	04	Networking (Access Point, Switch, Router)	Data - data terkait Networking (Access Point, Switch, Router)	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
DR. DATA DAN RISET											
	01	Pengumpulan Data berbasis TI Nasional-nasional yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kementerian BUMN, meliputi perencanaan kebutuhan data, pemantauan keadaan dan data dan penemuan data, dengan menggunakan media portal Kementerian BUMN berbasis teknologi informasi	Pengumpulan Data berbasis TI	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	02	Penyusunan Basis Data dan Kinerja Nasional-nasional yang berkaitan dengan pengolahan data dan informasi dimiliki oleh Kementerian BUMN yang telah dikumpulkan sebelumnya, dengan menggunakan media portal Kementerian BUMN berbasis teknologi informasi	Penyusunan Basis Data dan Kinerja	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	03	Penyajian Informasi Nasional-nasional yang berkaitan dengan pengolahan data dan informasi yang dimiliki oleh Kementerian BUMN dengan menggunakan media portal Kementerian BUMN berbasis teknologi informasi, meliputi kegiatan analisis dan penyajian informasi kepada pimpinan atau stakeholders lain yang membutuhkan	Laporan Analisis dan Penyajian Informasi	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbatas	Penru Kebijakan, Pelaksanaan kebijakan, Pengaruh Hukum	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	04	Knowledge Management Nasional-nasional yang berkaitan dengan kebijakan manajemen pengetahuan (knowledge management) di lingkungan Kementerian BUMN, meliputi proses perolehan pengetahuan (knowledge acquisition), penyampaian pengetahuan (knowledge dissemination), pemanfaatan pengetahuan (knowledge utilization), dan evaluasi pengetahuan (knowledge evaluation)	Knowledge Management	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
05		Pengembangan Kajian/Riset								Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	
	01	Makro Ekonomi Nasional-nasional yang berkaitan dengan penelitian dengan ruang lingkup dan topik yang melibatkan seluruh BUMN, meliputi perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian	Kajian/Riset Makro Ekonomi	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	02	Sektor Industri Nasional-nasional yang berkaitan dengan penelitian ruang lingkup dan topik yang melibatkan sebagian BUMN berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian, meliputi perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian	Kajian/Riset Sektor Industri	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	03	Riset Internal Nasional-nasional yang berkaitan dengan penelitian ruang lingkup dan topik yang melibatkan internal Kementerian BUMN, meliputi perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian	Riset Internal	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
	04	Pengolahan data riset terkait BUMN Nasional-nasional yang berkaitan dengan penelitian ruang lingkup dan topik yang melibatkan Kementerian BUMN	Riset terkait BUMN	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
06		Layanan Penyediaan data dan kerjasama riset. Nasional-nasional yang berkaitan dengan layanan penyediaan data dan kerjasama riset yang melibatkan stakeholder.	Data, Korespondensi	1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep Data & TI
II. SUBSTANTIF											
PB. PEMBINAAN BUMN											
	01	Anggaran Dasar BUMN dan Perubahannya Nasional-nasional yang berkaitan dengan Anggaran Dasar BUMN yang berbentuk Persero dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pendirian BUMN Perum beserta perubahannya	Anggaran Dasar, Peraturan Pemerintah Pendirian Perum	Sejauh masih berlaku	5 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Teknis
	02	Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BUMN Nasional-nasional yang berkaitan dengan kegiatan persiapan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemilu Modal dalam memberikan pengesahan atas RJPP BUMN mulai dari penyampaian sampai dengan diterbitkannya pengesahan RJPP meliputi:	-Surat penyampaian Usulan RJPP dari BUMN, berserta Buku RJPP dan Tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, -Undangan, notulen dan daftar hadir rapat pembahasan -Bahan presentasi Direksi -Nota Dinas laporan dan analisis usulan RJPP -Surat pengesahan RJPP	1 tahun setelah diperbarui	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Teknis



	01	<b>Penilaian Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengusulan calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN antara lain meliputi:	- CV Bakal Calon Dekom/Dewas BUMN - Hasil assessment oleh lembaga profesional - Surat Rekomendasi/Usulan Kementerian/Lembaga/ Instansi - Hasil Penilaian Pemenuhan Persyaratan Formal dan Non Formal Laporan - Hasil Penilaian Pemenuhan Persyaratan Materiil - Laporan Hasil Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas BUMN	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
	02	<b>Pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemerolehan pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN antara lain meliputi:	- Nota dinas usulan pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas - Surat keputusan Menteri BUMN tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan salinannya serta Surat penyampaian salinannya - Kontrak Manajemen/Surat Penyiaiman Dewan Komisaris/Dewan Pengawas - Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas - Undangan dan Berita Acara Rencana Pembentahan Pemberhentian untuk Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang diberhentikan sebelum habis masa jabatan	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
12		<b>Pergantian Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemerolehan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN antara lain meliputi:	- Surat usulan penggantian atau pengangkatan Direksi /Dewan Komisaris anak perusahaan - Surat rekomendasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN - Nota Dinas dan Surat persetujuan Menteri BUMN	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
13		<b>Monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas/Pejabat BUMN	Monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN BUMN	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
14		<b>Master Plan TI BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan dan Master Plan TI BUMN	Master Plan TI BUMN	1 tahun setelah diperbarui	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
<b>UV. PENGEMBANGAN USAHA DAN PRIVATISASI BUMN</b>											
01		<b>Pengembangan Usaha</b>									
	01	<b>Penyusunan Aspirasi Pemegang Saham</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan aspirasi pemegang saham berupa kajian, masukan dari kedua teknis dan narasumber, persetujuan penetapan dan sosialisasi	Aspirasi Pemegang Saham	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
	02	<b>Road Map Pembinaan BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana pengelolaan BUMN masa yang akan datang termasuk di dalamnya rencana holding sektor dan sejelasinya, kajian, sosialisasi, evaluasi dan surat penetapan	Road Map Pembinaan BUMN	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
	03	<b>Evaluasi Road Map Pembinaan BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap Road Map pembinaan BUMN	Laporan hasil evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
	04	<b>Kebijakan Deviden</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan segar bentuk proses pengusulan, penyusunan, kebijakan dan persetujuan haluan deviden	Kebijakan Deviden	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
02		<b>Privatisasi BUMN</b>									
	01	<b>Program Privatisasi Tahunan (PTP)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses privatisasi dari mulai pengajuan privatisasi oleh BUMN, Kedepitan teknis atau perugasan oleh pemerintah hingga mendapat persetujuan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Komite Privatisasi dan DPR RI	Program Privatisasi Tahunan (PTP)	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
	02	<b>Pelaksanaan Privatisasi</b> Naskah-naskah yang berikan dengan pelaksanaan privatisasi dan dilakukan seluruh pemangku kepentingan yang kegiatannya antara lain seleksi para profesi penunjang, proses terbitnya PP pelaksanaan privatisasi hingga pelaporan pelaksanaan privatisasi	Pelaksanaan Privatisasi	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
	03	<b>Sinergi BUMN dan Anak Perusahaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan seluruh kegiatan BUMN dan anak perusahaan BUMN, cuci BUMN dan lain-lain dari mulai identifikasi adanya potensi sinergi BUMN, action dari rencana sinergi BUMN dan pelaporan pelaksanaan sinergi BUMN	Kebijakan Sinergi BUMN dan Anak Perusahaan	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
04		<b>Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)</b>									
	01	<b>Pengusulan Penyertaan Modal Negara (PMN)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan segar bentuk proses usulan penyertaan Modal Negara (PMN) dan BUMN ke kedepitan teknis, Kementerian BUMN ke Kementerian Keuangan hingga persetujuan dari DPR RI	Pengusulan Penyertaan Modal Negara (PMN)	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
	02	<b>Penerbitan PP tentang Penyertaan Modal Negara (PMN)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan segar bentuk proses usulan penyertaan Modal Negara (PMN) dan BUMN ke kedepitan teknis, Kementerian BUMN ke Kementerian Keuangan hingga pembahasan RPP sampai dengan terbitnya PP	Penerbitan PP tentang Penyertaan Modal Negara (PMN)	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
	03	<b>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN)	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
05		<b>Penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan segar bentuk penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) kepada para pihak baik BUMN dan Kementerian terkait	Rekomendasi Penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN

06	<b>Penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI)/ Subsidiary Loan Agreement (SLA)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala bentuk penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI) Subsidiary Loan Agreement (SLA) berdasarkan susulan dari BUMN dan dilaporkan kepada Menteri BUMN	Rekomendasi Penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI)/ Subsidiary Loan Agreement (SLA)	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat menganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
07	<b>Public Service Obligation (PSO)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendefinisian Public Service Obligation (PSO)	persetujuan/kebijakan PSO	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat menganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN
<b>RP. Restrukturisasi dan Kebijakan Strategis Pengelolaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas</b>										
01	<b>Restrukturisasi Sektoral BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Restrukturisasi Sektoral BUMN berupa kajian bersama, penyampaian rencana restrukturisasi kepada Menteri Keuangan dan atau Presiden, pembahasan kajian bersama dan RPP dengan Kementerian terkait, Peraturan Pemerintah terkait, Pelaksanaan restrukturisasi sektorial/korporasi.	Kajian, Surat, Risalah Rapat	2 tahun	8 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat menganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Restrukturisasi BUMN dan PPKMN
02	<b>Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas</b>									
01	<b>Bahan aspirasi Kepentingan Pemerintah untuk BUMN Minoritas</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan bahan aspirasi kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham pada perusahaan dengan kepemilikan minoritas, antara lain: Surat yang ditujukan ke Direksi/ Dekom sebagai wakil pemerintah dan/ atau bukan sebagai wakil pemerintah	Surat, Nota	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat menganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Restrukturisasi BUMN dan PPKMN
02	<b>Analisis Laporan Kinerja Perusahaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas, antara lain: laporan tahunan perusahaan, laporan manajemen (Annual), dan laporan triwulan I, II, dan III	Laporan Analisis Kinerja	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN		Asdep Restrukturisasi BUMN dan PPKMN
03	<b>Analisis, Monitoring, dan evaluasi atas aksi korporasi strategis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan bahan analisis, monitoring dan evaluasi atas aksi korporasi strategis, isu-isu strategis perusahaan, analisis bahan sebagai wakil pemerintah dalam public exposure perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas	Laporan Analisis dan monitoring/ evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN		Asdep Restrukturisasi BUMN dan PPKMN
04	<b>Data kinerja perusahaan sistem informasi Kementerian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan update data kinerja perusahaan dengan kepemilikan negara	Data	2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN		Asdep Restrukturisasi BUMN dan PPKMN
05	<b>Pembinaan pengelolaan portofolio kepemilikan minoritas</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan bahan analisis isu pembinaan perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas	Surat, Nota, Laporan	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN		Asdep Restrukturisasi BUMN dan PPKMN
06	<b>Laporan Keuangan Kombinasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan kombinasi seluruh BUMN	Laporan Keuangan Kombinasi	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat menganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep Restrukturisasi BUMN dan PPKMN
<b>MB. Manajemen SDM Eksekutif BUMN</b>										
01	<b>Data Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN</b>									
01	<b>Data Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan perubahan susunan keanggotaan Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang akan habis masa jabatan atau data lainnya.	Data Direksi dan Dewan Komisaris	1 tahun Setelah diperbarui	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat menganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
02	<b>Data Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan perubahan susunan keanggotaan Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN yang akan habis masa jabatan atau data lainnya.	Data Direksi dan Dewan Komisaris	1 tahun Setelah diperbarui	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat menganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
02	<b>Kebijakan Terkait Key Performance Indicator (KPI) Direksi/Dekom/Dewas BUMN</b> Naskah - naskah yang berkaitan dengan penyusunan penetapan kebijakan terkait Key Performance Indicator (KPI) bagi Direksi dan Dekom/Dewas BUMN.	Surat, Nota	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat menganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
03	<b>Kebijakan dan koordinasi pengelolaan informasi SDM Eksekutif BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan monitoring atas penerapan data portal SDM BUMN	Surat, Nota, Data pengakattan dan pemberitahuan Direksi atau Dekom/Dewas BUMN, dan Nota Dinas/Memo tentang updating dan validasi data portal SDM	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat menganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
04	<b>Pengembangan SDM Eksekutif BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan bahan-bahan perumusan program pengembangan Direksi/Calon Direksi BUMN, bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pertemuan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang kegiatan pengembangan SDM Eksekutif BUMN.	Surat /kebijakan Menteri BUMN tentang pengembangan SDM eksekutif BUMN, Kurikulum pengembangan SDM Eksekutif BUMN, dan Laporan Pelaksanaan Program Pengembangan SDM Eksekutif BUMN	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat menganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
05	<b>Kebijakan dan Evaluasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan evaluasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul	Surat /Kebijakan Menteri BUMN tentang Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada BUMN.	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat menganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
06	<b>Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Good Corporate Governance pada BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan evaluasi penerapan Good Corporate Governance	Surat /Kebijakan Menteri BUMN tentang Good Corporate Governance (GCG) dan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada seluruh BUMN	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat menganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN

07	<b>Kebijakan dan Evaluasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Wajib Lapor</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan dan evaluasi terkait dengan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan KPK.	Surat /Kebijakan tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Evaluasi Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada seluruh BUMN	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
08	<b>Kebijakan dan Evaluasi pelaksanaan Outsourcing BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelesaian kebijakan dan evaluasi keterwakilan/joint/outsourcing di BUMN.	Surat/Kebijakan tentang outsourcing BUMN dan Laporan Monitoring Pelaksanaan Surat Edaran/Kebijakan Menteri BUMN tentang outsourcing BUMN	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Asdep MSE	Asdep MSE BUMN
09	<b>Remunerasi Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan remunerasi Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN	SK/Peretapan Remunerasi, Data	2 Tahun	5 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Asdep MSE	Asdep MSE BUMN
10	<b>Assesment Center</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penetapan Assesment Center bagi calon direksi/Dewan Komisaris BUMN/nasrat perusahaan BUMN	SK/Peretapan Assesment Center	2 Tahun	5 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN	Asdep MSE	Asdep MSE BUMN
11	<b>Talent BUMN</b>									Asdep MSE BUMN
01	<b>Talent Internal BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan CV/hasil Assesment nama - nama untuk dijadikan bacal calon Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang tidak belum diperoses lebih lanjut menuju tahap uji kelayakan dan kepatutan yang berasal dari internal BUMN	CV dan hasil Assesment	2 Tahun setelah pelaksanaan Assesment	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
02	<b>Talent Eksternal BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan CV/hasil Assesment nama - nama untuk dijadikan bacal calon Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang tidak belum diperoses lebih lanjut menuju tahap uji kelayakan dan kepatutan yang berasal dari eksternal BUMN	CV dan hasil Assesment	2 Tahun setelah pelaksanaan Assesment	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN		Asdep MSE BUMN
01	<b>Kebijakan Program TJSL</b> <b>Kementerian BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kegiatan Inisiatif dari KBUMN mengenai Kegiatan TJSL/PKBL (Program Kemiraan dan Bina Lingkungan), seperti Kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri, Siswa Mengenal Nusantara, dan lainnya	-Nota dinas/surat/risalah terkait Kegiatan Inisiatif dari Kementerian BUMN/Pemerintah -Naskah Dinas terkait Pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN tentang TJSL/PKBL	2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep TJSL
02	<b>Monitoring Evaluasi Pelaksanaan TJSL</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) meliputi Naskah Dinas terkait Kegiatan Monev TJSL/PKBL, Laporan dan rekomendasi Monev, Pengelolaan dan Analisis Data TJSL/PKBL	-Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Tanggung jawab sosial BUMN -Naskah Dinas terkait Kegiatan Monev TJSL/PKBL -Laporan dan rekomendasi Monev -Pengelolaan dan Analisis Data TJSL/PKBL	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak berdampak apapun bagi kinerja Kementerian BUMN	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Asdep TJSL
03	<b>Data TJSL BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan dan realisasi pengelolaan dana TJSL BUMN	Data TJSL BUMN	1 tahun setelah pelaksanaan	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN		Asdep TJSL

Klasifikasi	Deskripsi	Jenis Arsip
<b>FASILITATIF</b>		
RC.PERENCANAAN		
RC.01	<b>Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
RC.02	<b>RPJMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
RC.03	<b>Rencana strategis (Renstra)</b>	
RC.03.01	<b>Renstra Kementerian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Kementerian BUMN yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).	Renstra Kementerian
RC.03.02	<b>Renstra Unit Kerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Unit eselon 1 Kementerian BUMN yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	Renstra Unit Kerja
RC.04	<b>Rencana Kerja</b>	

RC.04.01	<b>Rencana Kerja Kementerian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan unit kerja Kementerian BUMN terdiri dari hasil pembahasan dari pertemuan multilateral, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, pertemuan Trilateral (Bappenas, Dirjen Anggaran/DJA, KBUMN) dan Bilateral (Bappenas/DJA, KBUMN).	Rencana kerja Kementerian
RC.04.02	<b>Rencana Kerja Unit Kerja</b> Arsip yang terkait Naskah-naskah yang berkaitan program dan kegiatan unit kerja eselon II yang merupakan penjabaran dari Renstra dalam satu tahun anggaran.	Rencana kerja unit kerja
RC.05	<b>Ketetapan Pagu Indikatif/Sementara</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penetapan pagu indikatif/sementara.	Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, RKAKL masing-masing unit kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) perencanaan, RAB dan persetujuan Komisi VI DPR RI.
RC.06	<b>Ketetapan Pagu Definitif</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penetapan pagu definitif	Surat Menteri Keuangan tentang alokasi pagu definitif, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (KL) masing-masing unit kerja, KAK Perencanaan, Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan Persetujuan Komisi VI DPR RI.
RC.07	<b>Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Revisi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan proses persetujuan revisi anggaran terdiri dari DIPA APBN, DIPA APBN-P dan DIPA Revisi	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan proses persetujuan revisi anggaran terdiri dari DIPA APBN, DIPA APBN-P dan DIPA Revisi.

RC.08	<b>Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk revisinya</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengisian aplikasi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari masing-masing unit kerja termasuk revisinya.	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk revisinya.
RC.09	<b>Penetapan Kinerja</b>	
RC.09.01	<b>Penetapan Kinerja Menteri BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kementerian BUMN.	PK Kementerian BUMN
RC.09.02	<b>Penetapan Kinerja Unit Kerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Penetapan Kinerja (PK) masing-masing unit kerja.	PK Unit Kerja
RC.10	<b>Pelaporan/Output Kinerja</b>	
RC.10.01	<b>Laporan Pelaksanaan Program Kerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan program kerja.	Laporan Pelaksanaan Program Kerja triwulan, semester dan tahunan.
RC.10.02	<b>Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan monitoring dan evaluasi program kerja.	Laporan Monitoring dan Evaluasi program Kerja baik bulanan, triwulan dan semester.
RC.11	<b>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelesaian LAKIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian dan Unit Kerja
RC.12	<b>Penetapan Ukuran Kinerja</b>	
RC.12.01	<b>Penetapan Ukuran Kinerja kementerian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan indikator kinerja utama Kementerian BUMN.	Penetapan Ukuran Kinerja
RC.12.02	<b>Penetapan Ukuran Kinerja Unit</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan indikator kinerja unit.	Penetapan Ukuran Kinerja

RC.13	<b>Monitoring Kinerja</b>	
RC.13.01	<b>Monitoring Kinerja Kementerian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring kinerja Kementerian	Kinerja Kementerian
RC.13.02	<b>Monitoring Kinerja Unit Kerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring kinerja Unit Kerja	Kinerja Unit
RC.14	<b>Arsitektur dan Informasi Kinerja Kementerian BUMN dan unit kerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Arsitektur dan Informasi Kinerja Kementerian BUMN dan unit kerja	Arsitektur dan Informasi Kinerja Kementerian BUMN dan unit kerja
SM.SUMBER DAYA MANUSIA		
SM.01	<b>Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM)</b>	
SM.01.01	<b>Analisis Jabatan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan data tentang suatu jabatan atau pekerjaan untuk menetapkan uraian jabatan atau pekerjaan.	Data Analisi Jabatan
SM.01.02	<b>Penetapan Kebutuhan SDM</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Arsip yang terkait penetapan kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Penetapan Kebutuhan SDM
SM.01.03	<b>Formasi Pegawai</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan persetujuan Formasi Pegawai ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Formasi Pegawai
SM.02	<b>Pendeklegasian Wewenang</b>	
SM.02.01	<b>Penetapan Pejabat Plh</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan Pejabat Pelaksana Harian.	Penetapan Pejabat Plh

SM.02.02	<b>Penetapan Pejabat Plt</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan Pejabat Pelaksana Tugas.	Penetapan Pejabat Plt
SM.03	<b>Pengadaan SDM ASN (PNS)</b>	
SM.03.01	<b>Penerimaan SDM</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan, meliputi seleksi administrasi, pemanggilan peserta test, pelaksanaan ujian tertulis,dan wawancara.	Pengumuman, soal ujian, daftar hadir, berita acara.
SM.03.02	<b>Penetapan Pengumuman Kelulusan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengadaan, meliputi pengumuman setiap tahapan seleksi/ test dan kelulusan akhir	Penetapan Pengumuman Kelulusan
SM.03.03	<b>Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan Kelengkapan Penetapan NIP	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP
SM.03.04	<b>Nota Usul Pengangkatan CASN menjadi ASN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan pengangkatan CASN menjadi ASN	Nota Usul Pengangkatan CASN menjadi ASN
SM.03.05	<b>Surat Keputusan CASN/ASN Kolektif</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan CASN/ASN Kolektif	Surat Keputusan CASN/ASN Kolektif
SM.03.06	<b>Berkas Lamaran yang Tidak Diterima</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan lamaran pendaftar yang tidak diterima	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima

SM.04	<b>Pengadaan SDM ASN (Non PNS)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan Pegawai ASN Non PNS/PPNPN dan Pegawai Alih Pengetahuan dari BUMN (Magang)	Pengadaan Pengadaan Pegawai non PNS dan Alih Pengetahuan
SM.05	<b>Pengadaan Jabatan Pimpinan Tinggi</b>	
SM.05.01	<b>Jabatan Pimpinan Tinggi Madya</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.	SK pembentukan TIM, Pengumuman, Panitia Seleksi, Daftar Hadir, Bahan Presentasi, Risalah, Surat Pengajuan Calon ke Presiden, Laporan kepada Komisi ASN.
SM.05.02	<b>Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.	SK pembentukan TIM, Pengumuman, Panitia Seleksi, Daftar Hadir, Bahan Presentasi, Risalah, Surat Pengajuan Calon ke Menteri, Laporan kepada Komisi ASN.
SM.05.03	<b>Berkas Lamaran yang Tidak Diterima</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak diterima.	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
SM.06	<b>Pengembangan Kompetensi SDM</b>	
SM.06.01	<b>Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penugasan Diklat, Kursus pegawai.	Surat Perintah, Surat Tugas, Laporan Pelaksanaan Diklat, Sertifikat Diklat.
SM.06.02	<b>Tugas Belajar, Izin Belajar</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penugasan Tugas Belajar, Izin Belajar pegawai	Surat Tugas Belajar, Surat Izin Belajar, Ijazah
SM.06.03	<b>Ujian Dinas Pegawai</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penugasan pegawai Ujian Dinas Pegawai.	Surat Perintah, Surat Tugas, Surat Keterangan Lulus

SM.06.04	<b>Asesmen</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen pegawai.	Surat Perintah, Surat Tugas, Laporan Hasil Asesmen.
SM.07	<b>Pembinaan SDM</b>	
SM.07.01	<b>Disiplin Pegawai</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan disiplin pegawai.	Daftar Hadir dan Rekapitulasi Daftar Hadir
SM.07.02	<b>Penilaian Prestasi Kerja (PPK) ASN PNS</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja ASN (PNS)	Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
SM.07.03	<b>Penilaian Prestasi Kerja (PPK) ASN Non PNS/Magang BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Atasan ASN Non PNS terhadap sasaran kerja dan perilaku kerja ASN Non PNS/Magang BUMN	Laporan Prestasi Kerja
SM.07.04	<b>Daftar Usul Penetapan Angka Kredit</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit, Penetapan Angka Kredit

SM.07.05	<b>Berkas Hukuman Disiplin/Pemberhentian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi proses penjatuhan hukuman disiplin PNS dimulai dari dokumen pemanggilan, berita acara pemeriksaan dan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin.	Berkas Hukuman Disiplin/Pemberhentian
SM.07.06	<b>Penghargaan dan Tanda Jasa</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara	Penghargaan dan Tanda Jasa
SM.08	<b>Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai.	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai
SM.09	<b>Mutasi SDM</b>	
SM.09.01	<b>Alih Status, pindah instansi, diperbantukan, dipekerjakan.</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala perubahan mengenai seseorang ASN seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pensiunan, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.	Alih Status, pindah instansi, diperbantukan, dipekerjakan, nota persetujuan/pertimbangan Kepala BKN.

SM.09.02	<b>Rotasi Kerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala perubahan mengenai seseorang ASN seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.	SK Rotasi Kerja
SM.09.03	<b>Penyesuaian Masa Kerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses untuk menghitung masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok.	SK Penyesuaian Masa Kerja
SM.09.04	<b>Mutasi Keluarga</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala perubahan mengenai segala perubahan mutasi keluarga ASN.	Surat Izin Pernikahan/Perceraian, Surat Penolakan Izin, Akta Nikah/Cerai, Akta Kelahiran Anak, Surat Keterangan Meninggal Dunia
SM.09.05	<b>Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi daftar nama pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk mendapatkan dapat diangkat/diberhentikan dalam jabatan struktural tertentu	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural
SM.09.06	<b>Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi daftar nama pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk mendapatkan dapat diangkat/diberhentikan dalam jabatan fungsional tertentu	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional

SM.09.07	<b>Usul Kenaikan Pangkat/Golongan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi daftar nama pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pada periode tertentu	Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
SM.09.08	<b>Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usulan yang berisi daftar nama pegawai yang akan dilakukan perubahan data dasar/status/ kedudukan hukumnya	Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
SM.09.09	<b>Berkas Baperjakat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi dalam memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian di lingkungan kementerian BUMN	Berkas Baperjakat
SM.09.10	<b>Pelantikan Pejabat Struktural/JFU</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengesahan pejabat dalam jabatan struktural/umum yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian	Pelantikan Pejabat Struktural/JFU
SM.10	<b>Administrasi Pegawai</b>	
SM.10.01	<b>Surat Perintah Dinas/Surat Tugas/Surat Izin</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan perintah/arahan/izin yang diberikan oleh pihak atasan atau instansi kepada bawahan atau anggota instansi agar melaksanakan dinas/tugas/izin tertentu yang diberikan atasan.	Perintah Dinas/Surat Tugas/Surat Izin

SM.10.02	<b>Cuti Besar</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian cuti yang dapat diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun secara terus-menerus.	Cuti Besar
SM.10.03	<b>Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti tahunan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan izin cuti pegawai untuk meninggalkan pekerjaan karena alasan yang dapat diterima (sakit, bersalin, menjalankan cuti tahunan)	Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti tahunan
SM.10.04	<b>Cuti Alasan Penting</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian cuti yang diberikan kepada Pegawai karena adanya alasan yang penting.	Cuti Alasan Penting
SM.10.05	<b>Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian cuti yang diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus dikarenakan alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak.	Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
SM.10.06	<b>Dokumentasi Identitas Pegawai</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendataan identitas pribadi PNS dan keluarganya.	usul penetapan karpeg/KPE/Karis/Karsu, Keanggotaan Organisasi profesi/kedinasan, Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4), Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), LHKPN, LHKASN.
SM.11	<b>Kesejahteraan Pegawai</b>	
SM.11.01	<b>Gaji, Tunjangan Uang Makan, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Suami/Istri</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan belanja gaji pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.	Gaji

SM.11.02	<b>Tunjangan Kinerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan belanja tunjangan kinerja pegawai.	Tunjangan Kinerja
SM.11.03	<b>Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan pemeliharaan kesehatan pegawai seperti proses pemeriksaan kesehatan berkala dan medical record	Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
SM.11.04	<b>Registrasi Surat Keterangan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses registrasi surat keterangan PNS Non PNS.	Registrasi Surat Keterangan
SM.11.05	<b>Layanan Asuransi Pegawai/BPJS</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada PNS dalam program jaminan kesehatan bagi PNS Non PNS	Layanan Asuransi Pegawai/BPJS
SM.11.06	<b>Layanan Tabungan Perumahan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan bantuan dana dari hasil pemupukan yang tidak harus dikembalikan untuk digunakan oleh PNS dalam memenuhi kebutuhan uang muka pembelian rumah sejahtera melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah atau kredit/pembiayaan membangun rumah diatas tanah sendiri, termasuk untuk biaya-biaya terkait kredit/pembiayaan rumah atau yang dipersyaratkan oleh bank.	Layanan Tabungan Perumahan

SM.11.07	<b>Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan kepada keluarga/ahli waris PNS yang meninggal karena dinas yang terdiri atas Gaji Terusan, Jaminan Kematian, Asuransi Kematian/Askem (THT), Asuransi Dwiguna (THT), Pensiun Janda/Duda/Anak, Pengembalian Uang Taperum PNS	Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas
SM.11.08	<b>Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
SM.11.09	<b>Layanan Olahraga dan Rekreasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada PNS dalam bentuk kesempatan/fasilitas untuk berolahraga dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan Olahraga dan Rekreasi
SM.11.10	<b>Layanan Kesejahteraan Lain (fasilitas kredit)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada PNS untuk memperoleh surat keterangan dari instansi dalam rangka mendapatkan fasilitas dari pihak tertentu.	Layanan Kesejahteraan Lain (fasilitas kredit)
SM.12	<b>Perselisihan/Sengketa Kepegawaian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian

SM.13	<b>Penugasan Pegawai Kementerian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penugasan pegawai Kementerian BUMN sebagai Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas/Organ Dewan Komisaris di BUMN/Anak Perusahaan BUMN.	Penugasan Pegawai Kementerian
SM.14	<b>Pemberhentian Pegawai/Pensiun</b>	
SM.14.01	<b>Pemberhentian dengan Hormat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan hormat.	SK Pemberhentian dan SK Pensiun.
SM.14.02	<b>Pemberhentian dengan tidak Hormat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat.	SK Pemberhentian.
SM.14.03	<b>Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Jandanya/Dudanya &amp; PNS yang meninggal</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses usulan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/jandanya/ dudanya dan ASN yang meninggal.	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Jandanya/Dudanya & PNS yang meninggal
SM.15	<b>Magang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan Magang SMA/SMK atau mahasiswa atau pegawai dari perusahaan lain	Magang
SM.16	<b>Personal File/Office Automation</b>	

SM.16.01	<p><b>Lamaran</b>            Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas lamaran</p>	Lamaran
SM.16.02	<p><b>Nota persetujuan/pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)</b>            Naskah-naskah yang berkaitan dengan Nota persetujuan/pertimbangan Kepala BKN.</p>	Nota persetujuan/pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
SM.16.03	<p><b>Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS/CASN</b>            Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengangkatan CPNS/CASN.</p>	Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS/CASN

SM.16.04	<p><b>Hasil pengujian kesehatan</b>            Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil pengujian kesehatan.</p>	Hasil pengujian kesehatan
SM.16.05	<p><b>Copy kartu pegawai (KARPEG)</b>            Naskah-naskah yang berkaitan dengan copy KARPEG.</p>	Copy kartu pegawai (KARPEG)
SM.16.06	<p><b>SK kenaikan gaji berkala</b>            Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK kenaikan gaji berkala.</p>	SK kenaikan gaji berkala

SM.16.07	<p><b>Surat pernyataan melaksanakan tugas/menduduki jabatan/surat pernyataan pelantikan</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas/menduduki jabatan/surat pernyataan pelantikan.</p>	Surat pernyataan melaksanakan tugas/menduduki jabatan/surat pernyataan pelantikan
SM.16.08	<p><b>SK pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional.</p>	SK pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional
SM.16.09	<p><b>SK perpindahan wilayah kerja</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK perpindahan wilayah kerja.</p>	SK perpindahan wilayah kerja

SM.16.10	<p><b>SK perpindahan antar instansi</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK perpindahan antar instansi.</p>	SK perpindahan antar instansi
SM.16.11	<p><b>SK peninjauan masa kerja</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK peninjauan masa kerja.</p>	SK peninjauan masa kerja
SM.16.12	<p><b>SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN)</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK CTLN.</p>	SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN)

SM.16.13	<p><b>Berita acara pemeriksaan</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan berita acara pemeriksaan.</p>	Berita acara pemeriksaan
SM.16.14	<p><b>SK hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS/ASN</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS/ASN.</p>	SK hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS/ASN
SM.16.15	<p><b>SK perbantuan kepala daerah otonom/instansi lain</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK perbantuan kepala daerah otonom/instansi lain.</p>	

SM.16.16	<p><b>SK penarikan kembali dari perbantuan</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK penarikan kembali dari perbantuan.</p>	SK penarikan kembali dari perbantuan
SM.16.17	<p><b>SK pemberian uang tunggu</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pemberian uang tunggu.</p>	SK pemberian uang tunggu
SM.16.18	<p><b>SK pemberhentian sebagai PNS/ASN</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pemberhentian sebagai PNS/ASN.</p>	SK pemberhentian sebagai PNS/ASN

SM.16.19	<p><b>SK pemberhentian sementara</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pemberhentian sementara.</p>	SK pemberhentian sementara
SM.16.20	<p><b>SK pengangkatan/pemberhentian sebagai Pejabat Negara</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengangkatan/pemberhentian sebagai Pejabat Negara.</p>	SK pengangkatan/pemberhentian sebagai Pejabat Negara
SM.16.21	<p><b>SK pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara.</p>	SK pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara

SM.16.22	<p><b>SK pengalihan PNS/ASN</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengalihan PNS/ASN.</p>	SK pengalihan PNS/ASN
SM.16.23	<p><b>Surat keterangan pernyataan hilang</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan pernyataan hilang.</p>	Surat keterangan pernyataan hilang
SM.16.24	<p><b>Surat kembalinya PNS yang dinyatakan hilang</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat kembalinya PNS yang dinyatakan hilang.</p>	Surat kembalinya PNS yang dinyatakan hilang

SM.16.25	<p><b>SK penggantian nama</b>            Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK penggantian nama.</p>	SK penggantian nama
SM.16.26	<p><b>Surat perbaikan tanggal tahun kelahiran PNS/ASN</b>            Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat perbaikan tanggal tahun kelahiran PNS/ASN.</p>	Surat perbaikan tanggal tahun kelahiran PNS/ASN
SM.16.27	<p><b>Isian formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS)</b>            Naskah-naskah yang berkaitan dengan Isian formulir PUPNS.</p>	Isian formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS)

SM.16.28	<p><b>Berita acara pengambilan sumpah</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan berita acara pengambilan sumpah.</p>	Berita acara pengambilan sumpah
SM.16.29	<p><b>Penetapan angka kredit</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan angka kredit.</p>	Penetapan angka kredit
SM.16.30	<p><b>Surat tugas/izin belajar dalam/luar negeri</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat tugas/izin belajar dalam/luar negeri.</p>	Surat tugas/izin belajar dalam/luar negeri

SM.16.31	<p><b>SK kenaikan pangkat penyesuaian ijazah</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.</p>	SK kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
SM.16.32	<p><b>Surat izin menjadi anggota Partai Politik (Parpol)/Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat izin menjadi anggota Parpol/Ormas/LSM.</p>	
SM.16.33	<p><b>Surat pencabutan izin menjadi anggota Parpol</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat pencabutan izin menjadi anggota Parpol.</p>	Surat pencabutan izin menjadi anggota Parpol

SM.16.34	<p><b>Surat keterangan meninggal dunia/hilang</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan meninggal dunia/hilang.</p>	Surat keterangan meninggal dunia/hilang
SM.16.35	<p><b>Surat keterangan mutasi keluarga</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan mutasi keluarga.</p>	Surat keterangan mutasi keluarga
SM.16.36	<p><b>Surat keterangan peningkatan pendidikan</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan peningkatan pendidikan.</p>	<p>Surat keterangan peningkatan pendidikan</p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan peningkatan pendidikan.</p>

SM.16.37	<p><b>Surat keterangan hasil penelitian khusus</b>            Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan hasil penelitian khusus.</p>	Surat keterangan hasil penelitian khusus
SM.16.38	<p><b>Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala</b>            Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala.</p>	Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
SM.16.39	<p><b>Surat izin berpergian ke luar negeri</b>            Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat izin berpergian ke luar negeri.</p>	Surat izin berpergian ke luar negeri

SM.16.40	<p><b>Kartu induk PNS/ASN</b>            Naskah-naskah yang berkaitan dengan kartu induk PNS/ASN.</p>	Kartu induk PNS/ASN
SM.16.41	<p><b>SK penempatan/penarikan pegawai</b>            Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK penempatan/penarikan pegawai.</p>	SK penempatan/penarikan pegawai
SM.16.42	<p><b>SK penarikan kembali dari perbantuan</b>            Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pernarikan kembali dari perbantuan.</p>	SK penarikan kembali dari perbantuan

SM.16.43	<p><b>SK pertimbangan status PNS/ASN</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pertimbangan status PNS/ASN.</p>	SK pertimbangan status PNS/ASN
SM.16.44	<p><b>SK persetujuan/penugasan kembali cuti di luar tanggungan negara</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK persetujuan/penugasan kembali CTLN.</p>	SK persetujuan/penugasan kembali cuti di luar tanggungan negara
SM.16.45	<p><b>Surat keterangan pengunduran diri/diberhentikan sebagai PNS/ASN karena menjadi pengurus/anggota Parpol</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat keterangan pengunduran diri/diberhentikan sebagai PNS/ASN, karena menjadi pengurus/anggota Parpol.</p>	Surat keterangan pengunduran diri/diberhentikan sebagai PNS/ASN karena menjadi pengurus/anggota Parpol

SM.16.46	<b>SK pensiun</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pensiun.	SK pensiun
SM.17	<b>Berkas Menteri/Wakil Menteri Sebagai Pejabat Negara</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Berkas Menteri/Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara	Berkas Menteri/Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara
OR.ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI		
OR.01	<b>Organisasi</b>	
OR.01.01	<b>Struktur Organisasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Menteri mengenai Rancangan Perpres tentang Kementerian BUMN Surat Menteri tentang Rancangan Permen tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian (konsep Permen dan Naskah Akademik/Paparan), Persetujuan Menpan atas Konsep Peraturan Presiden	Penetapan Struktur Organisasi
OR.01.02	<b>Evaluasi Organisasi</b> Naskah naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi organisasi Kementerian BUMN	Laporan hasil evaluasi

OR.01.03	<b>Penetapan Portofolio BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keputusan Menteri/atas Nama Menteri terkait penetapan portofolio BUMN	Penetapan Portofolio BUMN
OR.02	<b>Informasi Jabatan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum.	SK Informasi Jabatan
OR.03	<b>Evaluasi Jabatan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum, dan Peraturan Menteri BUMN tentang Grading.	Peraturan Menteri Evaluasi Jabatan
OR.04	<b>Analisis Beban Kerja (ABK)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum, dan Surat Keputusan tentang Analisis Beban Kerja (ABK).	Analisis Beban Kerja (ABK)
OR.05	<b>Penetapan/Penyelarasan SOP</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Usulan SOP Unit, Pembahasan SOP, Pengesahan SOP, Mekanisme Kerja/Tata hubungan kerja, dan Evaluasi atas Implementasi SOP	SOP
OR.06	<b>Reformasi Birokrasi</b>	
OR.06.01	<b>Pelaksanaan Program RB</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Road Map RB, Program Tahunan RB, SK Tim RB. ND, Risalah Rapat, dan Laporan Pelaksanaan Program dan Monitoring RB.	Road Map Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan Program RB

OR.06.02	<b>PENILAIAN PMPRB</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.	PMPRB
UM. UMUM		
UM.01	<b>Perencanaan dan Realisasi Pengadaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen RUP (Rancangan Umum Pengadaan) rencana pengadaan dalam satu tahun ke depan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan daftar realisasi pengadaan	Perencanaan dan Realisasi Pengadaan
UM.02	<b>Pengadaan Barang dan Jasa</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pengadaan barang dan jasa	Nota permintaan barang dan jasa dari PPK kepada kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) , Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang merupakan dokumen klasifikasi awal, Rancangan Kontrak, Undangan, Notulen, Daftar Hadir terkait pengadaan, Dokumen Prakualifikasi, Dokumen Pemilihan, Dokumen Penawaran yang disubmit oleh calon penyedia, dokumen pengadaan yang memuat tentang syarat-syarat dan klasifikasi apa saja yang harus dipenuhi oleh calon penyedia, Berita Acara Pengadaan, dan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)
UM.03	<b>Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)</b>	

UM.03.01	<b>Penatausahaan Barang Milik Negara</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP), Penggunaan Sementara Gedung dan Inventarisasi, dokumen usulan penetapan penggunaan barang, dokumen penetapan penggunaan barang, Daftar Barang Milik Negara/Buku Inventaris, Berita Acara Inventarisasi BMN, Dokumen Laporan BMN, Dokumen Laporan Persediaan, Perjanjian Penggunaan Sementara, Usulan Penggunaan Sementara	Penatausahaan Barang Milik Negara
UM.03.02	<b>Pemanfaatan BMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penayagunaan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan yang terdiri dari Permohonan Pemanfaatan oleh Pihak ekstern, Usulan Pemanfaatan, Persetujuan Pemanfaatan, Perjanjian Pemanfaatan, BAST Pemanfaatan, Addendum Perjanjian Pemanfaatan, Laporan Hasil Pemanfaatan	Pemanfaatan BMN
UM.03.03	<b>Pemindahtanganan/Penghapusan Barang Milik Negara</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemindahtanganan baik berupa penghapusan, hibah maupun pemusnahan	Usulan Pemindahtanganan dan Penghapusan, Dokumen Pembentukan Tim Penghapusan, Berita Acara Penetapan Limit, Persetujuan Pemindahtanganan, Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima (BAST) Pemindahtanganan, Keputusan Penghapusan, Laporan Lelang

UM.03.04	<b>Monitoring</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan tagihan atas penggunaan listrik dan air oleh tenant maupun tagihan atas sewa menyewa.	Rencana /Target PNBP, Rekapitulasi Realisasi PNBP, Laporan Realisasi PNBP, Surat Tagihan atas Pemanfaatan, Bukti Pembayaran atas Pemanfaatan.
UM.03.05	<b>Distribusi Barang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pendistribusian BMN kepada unit-unit kerja (BAST BMN).	Surat Permintaan/Bon Permintaan, Rekapitulasi Distribusi, Berita Acara Pinjam Pakai, Daftar Inventaris Ruangan/Daftar Inventaris Lainnya, Kartu Inventaris Barang
UM.03.06	<b>Pengelolaan Gudang (nota penyampaian dan daftar barang rusak)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelelolaan daftar barang rusak yang didalamnya terdapat berkas form penarikan Barang Milik Negara	Pengelolaan Gudang (nota penyampaian dan daftar barang rusak)
UM.04	<b>Pengamanan Aset Tanah dan Gedung</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan Sertifikat Tanah dan Gedung, Bukti penilaian tanah dan gedung	Sertifikat Tanah dan Gedung, Bukti penilaian tanah dan gedung
UM.05	<b>Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan gedung berupa laporan pengelola gedung maupun notulen	Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung
UM.06	<b>Penyediaan Ruang Rapat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan permohonan peminjaman ruang rapat serta jadwalnya	Penyediaan Ruang Rapat
UM.07	<b>Pelayanan Jasa Listrik, Telepon dan Air</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan tagihan atas pemakaian listrik, telepon, air serta bukti pembayarannya	Pelayanan Jasa Listrik, Telepon dan Air

UM.08	<b>Penyediaan Konsumsi Rapat dan Akomodasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyediaan Konsumsi rapat serta akomodasi berupa surat permohonan konsumsi, undangan rapat, absensi hadir, serta kwitansi pembayaran	Penyediaan Konsumsi Rapat dan Akomodasi
UM.09	<b>Penggunaan Kendaraan Dinas</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan penggunaan Bahan bakar, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas, peminjaman kendaraan dan laporan kerusakan kendaraan dinas.	laporan penggunaan Bahan bakar, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas, peminjaman kendaraan dan laporan kerusakan kendaraan dinas.
UM.10	<b>Layanan Keamanan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pengamanan termasuk parkir dan penerimaan tamu	Buku formulir tamu, kartu parkir, kartu akses
UM.11	<b>Layanan Rumah Tangga Lainnya (ID Card, infocus)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan peminjaman peralatan seperti infocus atau laptop, serta arsip permohonan pembuatan ID Card dan berita acara serah terimanya	Layanan Rumah Tangga Lainnya (ID Card, infocus)
UM.12	<b>Layanan Pakaian Dinas</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan pakaian dinas yang didalamnya terdapat berkas ukuran pegawai.	Daftar ukuran pakaian dinas pegawai
TU. TATA USAHA		
TU.01	<b>Administrasi Persuratan</b>	
TU.01.01	<b>Buku agenda (analog atau digital) surat masuk dan surat keluar</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengagendaan surat masuk dan surat keluar	Buku Agenda surat

TU.01.02	<b>Buku ekspedisi/tanda terima surat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi persuratan	Buku Ekspedisi
TU.02	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis</b>	
TU.02.01	<b>Penyusunan Sistem</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem kearsipan dinamis meliputi petunjuk pelaksanaan kearsipan dan persetujuan JRA	SOP, Peraturan Menteri, SK
TU.02.02	<b>Pembinaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan dinamis meliputi bimbingan teknis kearsipan, apresiasi/sosialisasi/ penyuluhan, supervisi kearsipan, penilaian jabatan fungsional arsiparis, lomba tertib arsip.	Materi Pembinaan dsb
TU.02.03	<b>Monitoring</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring pengelolaan arsip dinamis di lingkungan unit kerja kementerian BUMN.	Laporan Hasil Monitoring
TU.03	<b>Pengelolaan Arsip Inaktif</b>	
TU.03.01	<b>Penataan, Penyimpanan, Pemeliharaan dan Pengolahan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip inaktif mulai dari penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan.	Daftar arsip inaktif
TU.03.02	<b>Peminjaman Arsip</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman arsip inaktif di record center	Buku peminjaman/ formulir peminjaman
TU.04	<b>Penyusutan Arsip</b>	

TU.04.01	<b>Pemindahan Arsip Inaktif</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip	Berita acara pemindahan dan daftar arsip yang dipindahkan
TU.04.02	<b>Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip	daftar arsip usul musnah, berita acara pemusnahan, SK tim pemusnahan arsip, rekomendasi/pertimbangan pemusnahan arsip, dan surat keputusan pemusnahan.
TU.04.03	<b>Penyerahan Arsip Statis</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip	Daftar arsip yang diserahkan, berita acara serah terima arsip
TU.05	<b>Perpustakaan dan Dokumentasi</b>	
TU.05.01	<b>Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengada koleksi dan pengolahan bahan pustaka perpustakan Kementerian BUMN	Buku Induk Koleksi, Daftar buku dalam pemesanan, Daftar buku dan permintaan, Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah, Lembar kerja pengolahan shelf list/ Jajaran Kartu Utama (master list), Daftar tambahan Buku (Assesion list).
TU.05.02	<b>Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi Data</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan jasa dan informasi data yang diberikan perpustakaan Kementerian BUMN	Daftar tamu/peminjam, buku peminjaman, kartu peminjaman dan inventaris buku, data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka dan pemeliharaan, Bedah buku.
TU.05.03	<b>Pemeliharaan Bahan Pustaka</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan bahan pustaka di lingkungan Kementerian BUMN	Laporan kondisi bahan pustaka dan repografi bahan pustaka

TU.05.04	<b>Pembinaan Perpustakaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan perpustakaan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pengembangan SDM, pengembangan sarana dan prasarana, kerjasama dan jaringan perpustakaan, pengembangan minat baca.	Laporan kegiatan pembinaan
KU.KEUANGAN		
KU.01	<b>Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Internal Kementerian BUMN terkait Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	Kebijakan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Keuangan Negara, Surat dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
KU.02	<b>Pendapatan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Realisasi Pendapatan	Surat Setoran Pajak (SSP) dan Bukti Setornya, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Setornya, Surat Setor Bea dan Cukai (SSBC), Bukti setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja, Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank dsb.
KU.03	<b>Belanja/Pengeluaran Anggaran</b>	

KU.03.01	<b>Dokumen Pembayaran Keuangan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran baik yang berupa petunjuk pelaksanaan/mekanisme pengelolaan DIPA APBN Rutin dan PMN sampai dengan semua berkas pengajuan pencairan dana sampai terbitnya surat perintah pencairan dana (SP2D)	Pengajuan kebutuhan penarikan kas, bukti bukti tagihan dari pihak ketiga, surat permintaan pembayaran (SPP) LS , surat perintah membayar (SPM) LS, surat perintah pencairan dana (SP2D) LS Pencairan atas DIPA Penyertaan Modal Negara (PMN)
KU.03.02	<b>Uang Persediaan (UP)/Tambahan UP</b> Arsip yang berkaitan dengan belanja yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan uang persediaan yang dikelolanya	Bukti bukti tagihan dari pihak ketiga, surat permintaan pembayaran (SPP) GU, surat perintah membayar (SPM) GU, surat perintah pencairan dana (SP2D) GU
KU.03.03	<b>Pembukuan Perpendaharaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembukuan Bendahara Pengeluaran.	Pembukuan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara, Buku Kas Umum, Tunjangan Kinerja, Bukti Potong/SPT (PPh 21, PPh 22, PPh 23)
KU.03.04	<b>Dokumen Akuntansi Keuangan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pencatatan transaksi penggunaan anggaran	Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium Kartu Gaji Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional Berita Acara Pemeriksaan Kas Kas/Register Penutupan Kas Arsip Data Komputer (ADK) Berita Acara Rekonsiliasi Antara Satuan Kerja dan KPPN
KU.03.05	<b>Laporan Keuangan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Kementerian BUMN.	Laporan Keuangan Realisasi APBN (BA. 041) dan Laporan Keuangan PMN (BA. 999.03) terdiri dari : Neraca Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
KU.04	<b>Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara</b>	

KU.04.01	<b>Tuntutan Perpendaharaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan tuntutan atas pengelola perpendaharaan	Tuntutan Perpendaharaan
KU.04.02	<b>Tuntutan Ganti Rugi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengenaan tuntutan ganti rugi	Tuntutan Ganti Rugi
KU.05	<b>Laporan Monitoring dan Evaluasi anggaran</b> Arsip yang berkaitan dengan kegiatan laporan monitoring dan evaluasi anggaran	Laporan monitoring dan evaluasi
HM. HUBUNGAN MASYARAKAT		
HM.01	<b>Hubungan dengan media massa</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerbitan artikel, bulletin, <i>press conferences</i> , dokumentasi audiovisual, pembaruan informasi website, media social dan kliping.	Artikel, bulletin, press conferences, dokumentasi audiovisual, pembaruan informasi website, media social dan kliping.
HM.02	<b>Pameran</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pameran, festival, sayembara dsb	Laporan pelaksanaan pameran.
HM.03	<b>Hubungan antar Lembaga dan Masyarakat</b>	
HM.03.01	<b>Hubungan dengan DPR/DPD/MPR</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat pimpinan dengan DPR/DPD/MPR baik Hearing/Rapat Kerja/Koordinasi DPR	Undangan, Surat Dinas, Daftar Pertanyaan DPR, Bahan presentasi/Jawaban atas pertanyaan DPR.

HM.03.02	<b>Kunjungan Kerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kunjungan kerja DPR bersama pimpinan.	Laporan Kunjungan Kerja.
HM.03.03	<b>Hubungan Dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar instansi baik nusat maupun daerah	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan
HM.03.04	<b>Hubungan dengan organisasi sosial /LSM</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan organisasi kemasvarakatan	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan
HM.03.05	<b>Hubungan dengan BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga dengan BUMN	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan
HM.03.06	<b>Hubungan dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Swasta</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Swasta	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan
HM.03.07	<b>Hubungan antar Negara, Organisasi Internasional</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan Lembaga dengan Negara lain dan organisasi internasional	Surat surat yang terkait dengan pelaksanaan
HM.04	<b>Pemenuhan Informasi publik/PPID</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemenuhan informasi publik	Surat/Data
HM.05	<b>Pengaduan / Aspirasi Masyarakat</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan unjuk rasa, pengaduan masyarakat dan presensi publik	Surat/Data
HM.06	<b>Keprotokolan</b>	

HM.06.01	<b>Penyelenggaraan Acara Kedinasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan kegiatan protokoler acara kedinasan	Penyelenggaraan acara kedinasan
HM.06.02	<b>Agenda Kegiatan Pimpinan Lembaga</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan agenda pimpinan.	Agenda Kegiatan Pimpinan Lembaga
HM.06.03	<b>Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri</b> Arsip yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri pimpinan lembaga/instansi atau pejabat lainnya	Undangan, Laporan, Daftar Hadir
HM.06.04	<b>Upacara dan Acara Kementerian</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial menteri lainnya	Undangan , Daftar Hadir, Berita Acara, foto dsb.
HM.06.05	<b>Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi pernyelenggaraan perjalanan dinas dalam dan luar negeri pimpinan.	Tiket, Paspor, dan Visa.
HK. HUKUM		
HK.01	<b>Program Legislasi Lembaga/Instansi</b> Naskah-naskah yang terkait dengan penerbitan peraturan perundang-undangan	Usulan program legislasi dari Kementerian BUMN
HK.02	<b>Produk Hukum</b>	
HK.02.01	<b>Undang-undang</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang.	Kajian, Naskah Akademik, Rancangan Undang-undang, Keputusan Pembentukan PAK, Undangan dan Risalah/Transkip Rapat Pembahasan (Internal, Panitia Antar Kementerian, Harmonisasi, DPR), sampai diundangkan dan permintaan salinan

HK.02.02	<b>Peraturan Pemerintah</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan pemerintah.	Kajian Rancangan Peraturan Pemerintah, Keputusan Pembentukan PAK, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan (Internal, Panitia Antar Kementerian, Harmonisasi), sampai ditetapkan Peraturan Pemerintah dan permintaan salinan
HK.02.03	<b>Peraturan Presiden</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan praturan presiden.	Kajian, Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Pembentukan PAK, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan (Internal, Panitia Antar Kementerian, Harmonisasi), sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden dan permintaan salinan
HK.02.04	<b>Peraturan Presiden</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan praturan presiden.	Kajian, Keputusan Pembentukan TIM, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan (Internal Konseptor, Antar Unit, dengan BUMN), sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri BUMN dan permintaan salinan
HK.02.05	<b>Keputusan Presiden</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan Keputusan Presiden	Kajian, Nota Dinas dan Surat Pengusulan, Rancangan Keputusan Presiden, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan, Keputusan Presiden dan permintaan salinan
HK.02.06	<b>Keputusan Menteri BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Keputusan Menteri BUMN.	Kajian, Nota Dinas dan Surat Pengusulan, Rancangan Keputusan Menteri BUMN, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan, Keputusan Menteri BUMN dan permintaan salinan
HK.02.07	<b>Instruksi Presiden</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Instruksi Presiden.	Kajian, Nota Dinas dan Surat Pengusulan, Rancangan Instruksi Presiden, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan, Instruksi Presiden dan permintaan salinan
HK.02.08	<b>Instruksi Menteri</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Instruksi Menteri	Kajian, Nota Dinas dan Surat Pengusulan, Rancangan Instruksi Menteri BUMN, Undangan dan Risalah Rapat Pembahasan, Instruksi Menteri BUMN dan permintaan salinan
HK.02.09	<b>Surat Edaran Presiden</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Edaran Presiden Republik Indonesia dan permintaan salinan	Surat Edaran Presiden Republik Indonesia.

HK.02.10	<b>Surat Edaran Menteri BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Edaran Menteri BUMN	Kajian, Nota Dinas Pengusulan, Konsep Surat Edaran, Surat Edaran.
HK.02.11	<b>Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding / Kontrak / Perjanjian Kerjasama</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana kerjasama	Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding / Kontrak / Perjanjian Kerjasama
HK.02.12	<b>Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Salinan Peraturan, Nota Dinas dan Surat Laporan kepada JDIH Pusat termasuk peraturan perundang undangan yang dicinta dari instansi lain	Data Jaringan dokumentasi informasi hukum
HK.02.13	<b>Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Salinan Peraturan, Nota Dinas dan Surat Laporan kepada JDIH Pusat termasuk peraturan perundang undangan yang dicinta dari instansi lain	Keputusan/Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN
HK.03	<b>Bantuan Hukum</b>	
HK.03.01	<b>Perkara Perdata</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penanganan perkara perdata di lembaga peradilan umum, dimulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat peninjauan kembali	Relas, Surat Kuasa Khusus Mewakili Menteri, Akta Perdamaian Dalam Sidang, Gugatan, Jawaban Gugatan, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan Putusan Pengadilan Negeri, Banding, Kontra Memori Banding, Putusan Pengadilan Tinggi, Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Putusan Kasasi, Peninjauan Kembali, Memori PK, Kontra Memori PK, Putusan PK
HK.03.02	<b>Perkara Pidana/Pendampingan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pendampingan perkara pidana yang melibatkan pegawai atau pejabat di Kementerian BUMN di tingkat Penyidikan	(BAP Penyitaan Dokumen, Surat Penggilan Saksi)

HK.03.03	<b>Perkara Tata Usaha Negara/TUN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penanganan perkara perdata di lembaga Tata Usaha Negara (TUN), dimulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat peninjauan kembali.	Relas, Surat Kuasa Khusus Mewakili Menteri, Akta Perdamaian Dalam Sidang, Gugatan, Jawaban Gugatan, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan Putusan Pengadilan TUN, Banding, Kontra Memori Banding, Putusan Pengadilan Tinggi TUN, Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Putusan Kasasi, Peninjauan Kembali, Memori PK, Kontra Memori PK, Putusan PK
HK.03.04	<b>Perkara Arbitrase</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penanganan perkara yang bersifat khusus di luar Pengadilan	Berkas Perkara
HK.03.05	<b>Perkara Pengadilan Khusus</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penanganan perkara yang bersifat khusus, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan terkait <del>yang mengaturnya</del>	Berkas Perkara Pengadilan Khusus
HK.03.06	<b>Keterangan Ahli</b> Arsip yang berkaitan dengan pendampingan dalam rangka pemberian keterangan ahli dalam perkara pidana di tingkat penvidikan.	Surat Panggilan Pemberian Keterangan Ahli, BAP Keterangan Ahli di Kepolisian/Kejaksaan/KPK
HK.03.07	<b>Dukungan Hukum</b> Arsip yang berkaitan dengan dukungan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh BUMN.	Surat permohonan dukungan hukum dari BUMN, dan surat tanggapan/dukungan hukum dari Kementerian BUMN
HK.04	<b>Penyuluhan hukum dan Pembinaan Kesadaran Hukum</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi terkait atas hal-hal mengenai BUMN, khususnya yang terkait dengan penanganan hukum baik di dalam proses perdata, pidana, Tata Usaha Negara (TUN), dan sebagainya.	notulensi, bahan seminar/sosialisasi

HK.05	<b>Kebijakan umum Anggaran Dasar BUMN dan Perubahannya</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Anggaran Dasar BUMN seperti Anggaran Dasar (AD) BUMN dalam bentuk AD yang di notarilkan (Persero), Peraturan Pemerintah (PP) tentang pendirian BUMN (Perum), Perubahan AD BUMN	Nota, Konsep dan Penetapan Kebijakan Uum Anggaran Dasar
IA. INTERNAL AUDIT (INSPEKTORAT)		
IA.01	<b>Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)</b> Arsip yang terkait dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
IA.02	<b>Pelaksanaan Pengawasan</b>	
IA.02.01	<b>Laporan Hasil Pengawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Audit (audit kinerja Kementerian, audit dengan tujuan tertentu), Laporan Hasil Review (revieu laporan keuangan Kementerian BUMN, reviu RKAKL, reviu RKA BUN), Laporan Evaluasi (evaluasi sistem AKIP-SAKIP, evaluasi LKIP Eselon I, evaluasi penerapan SPIP), Monitoring dan Asistensi (LHPP BPK, LHP Inspektorat/UPG dll), Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. yang memerlukan tidak lanjut (TL)	Laporan Hasil Pengawasan

IA.02.02	<b>Laporan Hasil Pengawasan</b> Naskah-naskah yang berkaitan berupa Laporan Hasil Audit (audit kinerja Kementerian, audit dengan tujuan tertentu), Laporan Hasil Review (revieu laporan keuangan Kementerian BUMN, reviu RKAKL, reviu RKA BUN), Laporan Evaluasi (evaluasi sistem AKIP-SAKIP, evaluasi LKIP Eselon I, evaluasi penerapan SPIP), Monitoring dan Asistensi (LHPP BPK, LHP Inspektorat/UPG dll), Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. yang <b>tidak</b> memerlukan tindak lanjut (TL)	Laporan Hasil Pengawasan
IA.02.03	<b>Audit Investigasi yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI)
IA.02.04	<b>Monitoring dan Asistensi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Asistensi	Monitoring dan Asistensi (LHPP BPK, LHP Inspektorat/UPG dll)
IA.02.05	<b>Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Laporan Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

IA.03	<b>Pengawasan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (termasuk Whistle Blowing System)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Disposisi/surat tugas menteri BUMN-Sekretaris Menteri, Kertas Kerja, dan Laporan.	Pengawasan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (termasuk Whistle Blowing System)
TI.TEKNOLOGI INFORMASI		
TI.01	<b>Kebijakan dan Perencanaan TI</b>	
TI.01.01	<b>Master Plan TI</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Master Plan TI.	Enterprise Architecture, IT Governance dan High Level IT Program Road Map & High Level IT Spending Plan beserta undangan dan risalah rapat, dokumen hasil assessment dan peraturan menteri
TI.01.02	<b>Kebijakan terkait aplikasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi kebijakan terkait aplikasi, arsip kebijakan aplikasi berupa prosedur/SOP terhadap aplikasi yang ada di KBUMN, arsip koordinasi penyiapan content (isi) website (portal), arsip koordinasi penyajian content (isi) website (portal), arsip koordinasi pengintegrasian content (isi) website (portal)	Kebijakan terkait aplikasi
TI.01.03	<b>Kebijakan terkait Infrastruktur</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi kebijakan terkait infrastruktur, arsip kebijakan infrastruktur berupa Prosedur/SOP terkait Infrastruktur yang ada di KBUMN, arsip koordinasi pembangunan infrastruktur, arsip koordinasi pengembangan infrastruktur dan arsip koordinasi pemeliharaan infrastruktur	Kebijakan untuk infrastruktur
TI.02	<b>Aplikasi Berbasis Elektronik</b>	

TI.02.01	<b>Pembangunan Aplikasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi pembangunan aplikasi	Kesepakatan dengan User terkait pembangunan aplikasi baru, perbaikan atas catatan user, perubahan kebutuhan terhadap aplikasi dan penambahan fitur pada aplikasi dan arsip pembangunan aplikasi
TI.02.02	<b>Pengembangan Aplikasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi pembangunan aplikasi dan arsip pengembangan aplikasi	Pengembangan Aplikasi
TI.02.03	<b>Pemeliharaan Aplikasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi pemeliharaan aplikasi berupa hasil kesepakatan dengan User terkait dengan pemeliharaan aplikasi	Laporan perbaikan atas catatan user, perubahan kebutuhan terhadap aplikasi dan penambahan fitur pada aplikasi
TI.02.04	<b>Manual Penggunaan Aplikasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Petunjuk penggunaan aplikasi oleh User Terkait	Manual Penggunaan Aplikasi
TI.02.05	<b>Pengolahan, perawatan, dan Monitoring Database</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan catatan/log aktivitas monitoring pengelolaan database	Pengolahan, perawatan, dan Monitoring Database
TI.03	<b>Infrastruktur</b>	
TI.03.01	<b>Data Center (Server, Firewall, UPS, AC Presisi, EMS, Vesda)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembangunan Data Center tentang desain data center beserta topologi jaringan, arsip pengembangan data center tentang perkembangan teknologi dan center terbaru, arsip pemeliharaan data center tentang pengecekan dan pemeliharaan perangkat hardware di data center seperti UPS, AC Presisi, EMS dan Vesda serta back up data	Data - data terkait Data Center (Server, Firewall, UPS, AC Presisi, EMS, Vesda)

TI.03.02	<b>Hardware ( Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Infokus, IP Phone)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan hardware, serah terima dan distribusi hardware dan pemeliharaan hardware	Data - data terkait Hardware ( Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Infokus, IP Phone)
TI.03.03	<b>Software (Lisensi, OS, DB, Anti Virus, Software Pendukung)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan software, serah terima dan distribusi software	Data - data terkait Software (Lisensi, OS, DB, Anti Virus, Software Pendukung)
TI.03.04	<b>Networking (Access Point, Switch, Router)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan peralatan networking	Data - data terkait Networking (Access Point, Switch, Router)
DR. DATA DAN RISET		
DR.01	<b>Pengumpulan Data berbasis TI</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kementerian BUMN, meliputi perencanaan kebutuhan data, permintaan kepada pemilik data dan penerimaan data, dengan menggunakan media portal Kementerian BUMN berbasis teknologi informasi	Pengumpulan Data berbasis TI
DR.02	<b>Penyusunan Basis Data dan Kinerja</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi dimiliki oleh Kementerian BUMN yang telah dikumpulkan sebelumnya, dengan menggunakan media portal Kementerian BUMN berbasis teknologi informasi	Penyusunan Basis Data dan Kinerja

DR.03	<b>Penyajian Informasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengolahan data dan informasi yang dimiliki oleh Kementerian BUMN dengan menggunakan media portal Kementerian BUMN berbasis teknologi informasi, meliputi kegiatan analisis dan penyajian informasi kepada pimpinan atau stakeholders lain yang membutuhkan	Laporan Analisis dan Penyajian Informasi
DR.04	<b>Knowledge Management</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan manajemen pengetahuan ( <i>knowledge management</i> ) di lingkungan Kementerian BUMN, meliputi proses perolehan pengetahuan ( <i>knowledge acquisition</i> ), penyimpanan pengetahuan ( <i>knowledge storing</i> ), penyebaran pengetahuan ( <i>knowledge dissemination</i> ), pemanfaatan pengetahuan ( <i>knowledge utilization</i> ), dan evaluasi pengetahuan ( <i>knowledge evaluation</i> )	<i>Knowledge Management</i>
DR.05	<b>Pengembangan Kajian/Riset</b>	
DR.05.01	<b>Makro Ekonomi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian dengan ruang lingkup dan topik yang melibatkan seluruh BUMN, meliputi perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian	Kajian/Riset Makro Ekonomi
DR.05.02	<b>Sektor Industri</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian ruang lingkup dan topik yang melibatkan sebagian BUMN berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian, meliputi perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian	Kajian/Riset Sektor Industri

DR.05.03	<b>Riset Internal</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian ruang lingkup dan topik yang melibatkan internal Kementerian BUMN, meliputi perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian	Riset Internal
DR.05.04	<b>Pengolahan data riset terkait BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelitian ruang lingkup dan topik yang melibatkan Kementerian BUMN	Riset terkait BUMN
DR.06.DR	<b>Layanan Penyediaan data dan kerjasama riset.</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan penyediaan data dan kerjasama riset yang melibatkan stakeholder	Data, Korespondensi
<b>SUBSTANTIF</b>		
PB. PEMBINAAN BUMN		
PB.01	<b>Anggaran Dasar BUMN dan Perubahannya</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Anggaran Dasar BUMN yang berbentuk Persero dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pendirian BUMN Perum beserta perubahannya	Anggaran Dasar, Peraturan Pemerintah Pendirian Perum
PB.02	<b>Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemilik Modal dalam memberikan pengesahaan atas RJPP BUMN mulai dari penyampaian sampai dengan diterbitkannya pengesahan RJPP meliputi:	-Surat penyampaian Usulan RJPP dari BUMN, beserta Buku RJPP dan Tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, -Undangan, notulen dan daftar hadir rapat pembahasan -Bahan presentasi Direksi -Nota Dinas laporan dan analisis usulan RJPP -Surat pengesahan RJPP

PB.03	<p><b>Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengusulan, pemrosesan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN antara lain meliputi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari Direksi BUMN beserta draft usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Tanggapan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas</li> <li>- Undangan, daftar hadir dan Notulen Rapat pembahasan</li> <li>- Nota Dinas laporan dan analisis usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)</li> <li>- Surat Kuasa Menteri kepada Asdep Teknis atau Surat Kuasa Deputi kepada Pejabat Lainnya</li> <li>- Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan</li> <li>- Undangan RUPS, Usulan Agenda RUPS dan Daftar Hadir RUPS</li> <li>- Bahan Presentasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas</li> <li>- Surat kuasa anggota direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas apabila tidak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)</li> <li>- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Surat Menteri BUMN selaku Pemilik Modal</li> </ul>
PB.04	<p><b>Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengusulan, pemrosesan dan pengesahan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN antara lain meliputi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat penyampaian Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari BUMN beserta buku Draft Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas</li> <li>- Undangan, Notulen dan Daftar Hadir rapat pembahasan</li> <li>- Nota Dinas laporan dan analisis usulan revisi RKAP</li> <li>- Surat Menteri/Deputi tentang Persetujuan Revisi RKAP</li> </ul>

PB.05	<p><b>Reviu Laporan manjemen pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi kinerja BUMN atas pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada tahun berjalan secara berkala meliputi reviu atas laporan manajemen Triwulan I, laporan manajemen Semester I, laporan triwulan III disertai penyampaian tanggapan tertulis hasil reviu kepada manajemen serta reviu atas laporan manajemen unaudited dan laporan manajemen audited</p>	Reviu Laporan manjemen pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN
PB.06	<p><b>Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)</b></p> <p><b>Pengesahan Laporan Tahunan BUMN</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan Pengesahan Laporan Tahunan dan Persetujuan Laporan Keuangan BUMN oleh RUPS/Menteri antara lain meliputi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat penyampaian Laporan tahunan-audited dari BUMN, buku Laporan Tahunan-audited termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, laporan Hasil Audit Independen serta Tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas</li> <li>- Nota Dinas laporan dan analisis usulan persetujuan dan pengesahan laporan tahunan serta agenda terkait lainnya</li> <li>- Surat Kuasa Menteri BUMN dan persetujuan mengenai hal-hal yang perlu keputusan RUPS untuk masing-masing agenda RUPS serta surat Kuasa Pemegang Saham lainnya</li> <li>- Undangan dan Daftar Hadir RUPS</li> <li>- Bahan Presentasi Direksi dan Dewan Komisaris</li> <li>- Surat kuasa anggota direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas apabila tidak menghadiri RUPS</li> <li>- Risalah RUPS/Surat Menteri selaku Pemilik Modal</li> </ul>

PB.07	<b>Monitoring dan Evaluasi Berkala</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan program kerja BUMN baik melalui kunjungan lapangan maupun berdasarkan laporan tertulis misalnya monitoring pelaksanaan investasi BUMN, pencapaian kinerja cabang/unit, Pelaksanaan PKBL, atau pelaksanaan GCG.	Monitoring dan Evaluasi Berkala
PB.08	<b>Aksi Koorporasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala tindakan perusahaan yang perlu mendapat persetujuan/pengesahan RUPS/Menteri BUMN atau perlu dilaporkan kepada RUPS/Menteri BUMN termasuk Legal opinion bagi Menteri dan Deputi terkait aksi korporasi antara lain meliputi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaragunaan aset (Sewa, KSO, BOT, BTO, BOWT)</li> <li>- Pemindahtanganan /Penghapusbukan aset</li> <li>'- Penarikan Kredit dan pengagunan aset</li> <li>- Avalist dan Corporate Guarante</li> <li>'- Pemberian Pinjaman ke anak Perusahaan</li> <li>- Pendirian Anak Perusahaan dan/atau penyertaan modal pada perusahaan patungan</li> <li>- Penambahan atau pengurangan Penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan</li> <li>- Likuidasi anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan</li> <li>- Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan</li> <li>- Persetujuan Penunjukan Wakil Perseroan ke Anak Perusahaan/Usaha -Patungan</li> <li>'- Blue Print Organisasi Perseroan</li> <li>- Logo Perseroan</li> <li>- Pembentukan Yayasan, Organisasi dan/atau perkumpulan</li> <li>Pengusulan wakil perseroan untuk <del>menjadi otonom organisasi Direktori dan</del></li> </ul>

PB.09	<b>Likuidasi BUMN/Perubahan status bentuk hukum BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan likuidasi BUMN maupun perubahan status bentuk hukum BUMN antara lain:	- Korespondensi, Nota dan Surat Persetujuan Menteri - Homologasi
PB.10	<b>Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi BUMN</b>	
PB.10.01	<b>Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Direksi BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengusulan calon Direksi BUMN serta pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Calon Direksi BUMN antara lain meliputi:	- CV Bakal Calon Direksi BUMN - Hasil assesment oleh lembaga profesional '- Surat lamaran/pernyataan minat Bakal Calon Direksi BUMN (sumber eksternal) '- Surat Rekomendasi/Usulan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris - Company Profile '- Surat Pernyataan Bakal Calon Direksi BUMN - Hasil Wawancara/ Evaluasi Tim UKK '- Berita Acara Pelaksanaan UJKK
PB.10.02	<b>Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi BUMN antara lain meliputi:	- Nota dinas usulan pengangkatan Direksi - Surat keputusan Menteri BUMN tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi BUMN dan salinannya serta Surat penyampaian salinannya - Kontrak Manajemen/Surat Pernyataan Direksi - Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Direksi - Undangan dan Berita Acara Rencana Pemberitahuan Pemberhentian untuk Direksi yang diberhentikan sebelum habis masa jabatan
PB.11	<b>Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN</b>	

PB.11.01	<b>Penilaian Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengusulan calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta pelaksanaan penilaian Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN antara lain meliputi:	- CV Bakal Calon Dekom/Dewas BUMN - Hasil assesment oleh lembaga profesional - Surat Rekomendasi/Usulan Kementerian/Lembaga/ Instansi - Hasil Penilaian Pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain - Hasil Penilaian Pemenuhan Persyaratan Materiil '- Laporan Hasil Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas BUMN
PB.11.02	<b>Pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN antara lain meliputi:	- Nota dinas usulan pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas '- Surat keputusan Menteri BUMN tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan salinannya serta Surat penyampaian salinannya - Kontrak Manajemen/Surat Pernyataan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas - Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas - Undangan dan Berita Acara Rencana Pemberitahuan Pemberhentian untuk Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang diberhentikan sebelum habis masa jabatan
PB.12	<b>Pergantian Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN antara lain meliputi:	- Surat usulan penggantian atau pengangkatan Direksi /Dewan Komisaris anak perusahaan - Surat rekomendasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN - Nota Dinas dan Surat persetujuan Menteri BUMN

PB.13	<b>Monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas/Pejabat RI IMN	Monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN BUMN
PB.14	<b>Master Plan TI BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan dan Master Plan TI BUMN	Master Plan TI BUMN
UV. PENGEMBANGAN USAHA DAN PRIVATISASI BUMN		
UV.01	<b>Pengembangan Usaha</b>	
UV.01.01	<b>Penyusunan Aspirasi Pemegang Saham</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan aspirasi pemegang saham berupa kajian, masukan dari kedeputian teknis dan narasumber, persetujuan penetapan dan sosialisasi	Aspirasi Pemegang Saham
UV.01.02	<b>Road Map Pembinaan BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana pengelolaan BUMN di masa yang akan datang termasuk di dalamnya rencana holding sektoral dan sejenisnya, kajian, sosialiasi, evaluasi dan surat penetapan	Road Map Pembinaan BUMN
UV.01.03	<b>Evaluasi Road Map Pembinaan BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap Road Map pembinaan BUMN	Laporan hasil evaluasi

UV.01.04	<b>Kebijakan Deviden</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala bentuk proses pengusulan, penyusunan, kebijakan dan persetujuan penetapan dividen	Kebijakan Deviden
UV.02	<b>Privatisasi BUMN</b>	
UV.02.01	<b>Program Privatisasi Tahunan (PTP)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses privatisasi dari mulai pengajuan privatisasi oleh BUMN, Kedeputian teknis atau penugasan oleh pemerintah hingga mendapat persetujuan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Komite Privatisasi dan DPR RI	Program Privatisasi Tahunan (PTP)
UV.02.02	<b>Pelaksanaan Privatisasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan privatisasi yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan yang kegiatannya antara lain seleksi para profesi penunjang, proses terbitnya PP pelaksanaan privatisasi hingga pelaporan pelaksanaan privatisasi	Pelaksanaan Privatisasi
UV.03	<b>Sinergi BUMN dan Anak Perusahaan</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan seluruh proses kegiatan sinergi BUMN, anak perusahaan BUMN, cucu BUMN dan lain-lain dari mulai identifikasi adanya potensi sinergi BUMN, <i>action</i> dari rencana sinergi BUMN dan pelaporan pelaksanaan sinergi BUMN	Kebijakan Sinergi BUMN dan Anak Perusahaan
UV.04	<b>Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)</b>	

UV.04.01	<b>Pengusulan Penyertaan Modal Negara (PMN)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala bentuk proses usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari BUMN ke kedeputian teknis, Kementerian BUMN ke Kementerian Keuangan hingga persetujuan dari DPR RI	Pengusulan Penyertaan Modal Negara (PMN)
UV.04.02	<b>Penerbitan PP tentang Penyertaan Modal Negara (PMN)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala proses penerbitan PP antara lain kajian bersama, pembahasan antar instansi hingga pembahasan RPP sampai dengan terbitnya PP	Penerbitan PP tentang Penyertaan Modal Negara (PMN)
UV.04.03	<b>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN)
UV.05	<b>Penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala bentuk penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) kepada para pihak baik BUMN dan Kementerian terkait	Rekomendasi Penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

UV.06	<b>Penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI)/ Subsidiary Loan Agreement (SLA)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan segala bentuk penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI) Subsidiary Loan Agreement (SLA) berupa pengusulan dari BUMN ke kedeputian teknis, penetapan dan laporan akhir kepada Menteri BUMN	Rekomendasi Penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI)/ Subsidiary Loan Agreement (SLA)
UV.07	<b>Public Service Obligation (PSO)</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendataan Public Service Obligation (PSO)	persetujuan/kebijakan PSO
RP.Restrukturisasi dan Kebijakan Strategis Pengelolaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas.		
RP.01	<b>Restrukturisasi Sektoral BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Restrukturisasi Sektoral BUMN berupa konsep kajian bersama, pembahasan kajian bersama, penyampaian rencana restrukturisasi kepada Menteri Keuangan dan atau Presiden, pembahasan kajian bersama dan RPP dengan Kementerian terkait, Peraturan Pemerintah terkait, Pelaksanaan restrukturisasi sektoral/korporasi.	Kajian, Surat, Risalah Rapat
RP.02	<b>Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas</b>	

RP.02.01	<p><b>Bahan aspirasi Kepentingan Pemerintah untuk BUMN Minoritas</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan aspirasi kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham pada perusahaan dengan kepemilikan minoritas, antara lain: Surat yang ditujukan ke Direksi/ Dekom sebagai wakil pemerintah dan/ atau bukan sebagai wakil pemerintah</p>	Surat, Nota
RP.02.02	<p><b>Analisis Laporan Kinerja Perusahaan</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas, antara lain: laporan tahunan perusahaan, laporan manajemen (Audited), dan laporan triwulan I, II, dan III</p>	Laporan Analisis Kinerja
RP.02.03	<p><b>Analisis, Monitoring, dan evaluasi atas aksi korporasi strategis</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan bahan analisis, monitoring dan evaluasi atas aksi korporasi strategis, isu-isu strategis perusahaan, analisis bahan sebagai wakil pemerintah dalam public expose perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas</p>	Laporan Analisis dan monitoring/ evaluasi
RP.02.04	<p><b>Data kinerja perusahaan sistem informasi Kementerian</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan update data kinerja perusahaan dengan kepemilikan negara</p>	Data

RP.02.05	<b>Pembinaan pengelolaan portofolio kepemilikan Negara</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan bahan analisis isu pembinaan perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas	Surat, Nota, Laporan
RP.02.06	<b>Laporan Keuangan Kombinasi</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan kombinasi seluruh BUMN	Laporan Keuangan Kombinasi
MB. Manajemen SDM Eksekutif BUMN		
MB.01	<b>Data Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN</b>	
MB.01.01	<b>Data Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan perubahan susunan keanggotaan Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang akan habis masa jabatan atau data lainnya.	Data Direksi dan Dewan Komisaris
MB.01.02	<b>Data Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan perubahan susunan keanggotaan Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN yang akan habis masa jabatan atau data lainnya.	Data Direksi dan Dewan Komisaris

MB.02	<p><b>Kebijakan Terkait Key Performance Indicator (KPI)</b></p> <p><b>Direksi/Dekom/Dewas BUMN</b></p> <p>Naskah - naskah yang berkaitan dengan penyusunan penetapan kebijakan terkait Key Performance Indicator (KPI) bagi Direksi dan Dekom/Dewas BUMN</p>	Surat, Nota
MB.03	<p><b>Kebijakan dan koordinasi pengelolaan informasi SDM Eksekutif BUMN</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan monitoring atas pemenuhan data portal SDM BUMN</p>	Surat, Nota, Data pengangkatan dan pemberhentian Direksi atau Dekom/Dewas BUMN, dan Nota Dinas/Memo tentang updating dan validasi data portal SDM
MB.04	<p><b>Pengembangan SDM Eksekutif BUMN</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan bahan-bahan perumusan program pengembangan Direksi/Calon Direksi BUMN, bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang kegiatan pengembangan SDM Eksekutif BUMN.</p>	Surat /kebijakan Menteri BUMN tentang pengembangan SDM eksekutif BUMN, Kurikulum pengembangan SDM Eksekutif BUMN, dan Laporan Pelaksanaan Program Pengembangan SDM Eksekutif BUMN
MB.05	<p><b>Kebijakan dan Evaluasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada BUMN</b></p> <p>Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan evaluasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada BUMN</p>	Surat /Kebijakan Menteri BUMN tentang Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada BUMN.

MB.06	<b>Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Good Corporate Governance pada BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan evaluasi penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN	Surat /Kebijakan Menteri BUMN tentang Good Corporate Governance (GCG) dan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG )pada seluruh BUMN
MB.07	<b>Kebijakan dan Evaluasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Wajib Lapor BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakandan evaluasi atas kewajiban kepada seluruh Wajib Lapor BUMN untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan dan ketentuan KPK	Surat /Kebijakan tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Evaluasi Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada seluruh BUMN
MB.08	<b>Kebijakan dan Evaluasi pelaksanaan Outsourcing BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan evaluasi ketenagakerjaan/outsourcing di BUMN.	Surat/Kebijakan tentang outsourcing BUMN dan Laporan Monitoring Pelaksanaan Surat Edaran/Kebijakan Menteri BUMN tentang outsourcing BUMN
MB.09	<b>Remunerasi Direksi Komisaris dan Dewan Pengawa BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan remunerasi Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN	SK/Penetapan Remunerasi, Data
MB.10	<b>Assesment Center</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penetapan Assesment Center bagi calon direksi/Dewan Komisaris BUMN/anak perusahaan BUMN	SK/Penetapan Assesment Center
MB.11	<b>Talent BUMN</b>	

MB.11.01	<b>Talent Internal BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan CV/hasil Assesment nama - nama untuk dijadikan bakal calon Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang tidak/belum diproses lebih lanjut menuju tahap uji kelayakan dan keputusan yang berasal dari internal BUMN	CV dan hasil Assesment
MB.11.02	<b>Talent Eksternal BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan CV/hasil Assesment nama - nama untuk dijadikan bakal calon Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang tidak/belum diproses lebih lanjut menuju tahap uji kelayakan dan keputusan yang berasal dari eksternal BUMN	CV dan hasil Assesment
SL. TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN		
SL.01	<b>Kebijakan Program TJSL Kementerian BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kegiatan Inisiatif dari KBUMN mengenai kegiatan TJSL/PKBL(Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), seperti Kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri, Siswa Mengenal Nusantara, dan lainnya	-Nota dinas/surat/risalah terkait Kegiatan Inisiatif dari Kementerian BUMN/Pemerintah -Naskah Dinas terkait Pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN tentang TJSL/PKBL
SL.02	<b>Monitoring Evaluasi Pelaksanaan TJSL</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) meliputi Naskah Dinas terkait Kegiatan Monev TJSL/PKBL, Laporan dan rekomendasi Monev, Pengelolaan dan Analisis Data TJSL/PKBL	-Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Tanggung jawab sosial BUMN -Naskah Dinas terkait Kegiatan Monev TJSL/PKBL -Laporan dan rekomendasi Monev -Pengelolaan dan Analisis Data TJSL/PKBL

SL.03	<b>Data TJSL BUMN</b> Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan dan realisasi pengelolaan dana TJSL BUMN	Data TJSL BUMN
-------	---	----------------

Aktif	Inaktif	Keterangan	SKKAAD	Hak Akses	Dasar Pertimbangan
1 Tahun setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah Tidak Berlaku	4 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah Tidak Berlaku	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun	3 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun	3 Tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	2 tahun	Musnah kecuali laporan tahunan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali LAKIP Kementerian Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah Tidak Berlaku	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah Tidak Berlaku	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah Kecuali Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun, setelah diangkat ASN	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun, setelah diangkat ASN	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
-	-	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN
1 tahun, setelah Surat Keputusan (SK) ditetapkan	2 tahun	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN
2 tahun, setelah Petikan SK ditetapkan	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun, setelah tahun anggaran berakhir	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun, setelah pelantikan	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN
2 tahun, setelah pelantikan	2 tahun	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan
1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah kecuali sertifikat masuk berkas perseorangan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN
1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah kecuali Ijazah masuk berkas perseorangan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN
1 tahun, setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah kecuali Surat Keterangan Lulus masuk berkas perseorangan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN

3 Tahun	2 Tahun	Musnah kecuali laporan hasil asesmen Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Esselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN
1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun, setelah penilaian ditetapkan	3 tahun	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Esselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun, setelah penilaian ditetapkan	3 tahun	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah, kecuali SK Penetapan Angka Kredit masuk berkas perseorangan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah, kecuali BAP dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun, setelah memperoleh keputusan tetap	5 tahun	Dinilai kembali, kecuali SK Penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu bagi kinerja Kementerian BUMN
1 tahun, setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun, setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun, setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun, setelah penetapan	-	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Surat Persetujuan dan SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	5 tahun	Musnah kecuali pejabat eselon I Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
Masuk Personal File	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah SK ditetapkan	-	Masuk Berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
3 tahun setelah pelaksanaan	-	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah penetapan	-	Masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	8 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun	8 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun	1 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	-	Permanen sampai pensiun	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah memperoleh keputusan yang bersifat tetap	2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali penugasan untuk Direksi/ Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional <u>Permanen</u>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 Tahun tidak menjabat	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Penetapan Informasi Jabatan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Peraturan Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Penetapan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Penetapan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah tidak berlaku	5 tahun	Musnah kecuali Penetapan Kebijakan Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun	8 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun	8 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah Perjanjian Berakhir	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 Tahun setelah Perjanjian Berakhir	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah audit	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
Selama aset Masih Dimiliki	1 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	dinilai kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
Selama masih berlaku	2 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
Selama masih berlaku	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
Selama masih berlaku	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

Selama masih berlaku	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen kecuali fisik arsip musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Musnah kecuali buku induk koleksi Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun	1 Tahun	musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun	2 Tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun setelah KPA tidak menjabat	4 Tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai kembali kecuali Pencairan berkaitan dengan PMN Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah UU APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dilunasi	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen	Terbatas	Penentu Kebijakan , Pelaksana Kebijakan , Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dilunasi	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen	Terbatas	Penentu Kebijakan , Pelaksana Kebijakan , Penegak Hukum	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	2 tahun	Musnah Kecuali Dokumentasi Kegiatan Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	
2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali isu strategis Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	HM.03.03
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	
2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali isu strategis Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	
1 tahun	1 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	
2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali isu strategis Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	
1 tahun	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	
1 tahun	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN	

1 tahun	2 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	1 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun	1 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali dokumentasi Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah diundangkan	3 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN



1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Dinilai kembali kecuali Menteri Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 Tahun setelah diperbarui	-	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 Tahun setelah ditetapkan	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 Tahun setelah Inkrah	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 Tahun setelah Inkrah	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 Tahun setelah Inkrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 Tahun setelah Inkrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 Tahun setelah Inkrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 Tahun setelah Inkrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 Tahun setelah Inkrach	2 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon II	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Dinilai Kembali	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah tindak lanjut selesai	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah tindak lanjut selesai	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun setelah tindak lanjut selesai	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun setelah tidak dipergunakan	5 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	5 tahun	Permanen	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah tidak dikembangkan	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbatas	Penentu Kebijakan , Pelaksanaan kebijakan, Penegak Hukum	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN

1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah data diperbarui	5 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah diperbarui	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	8 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	8 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun setelah diperbarui	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	8 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun Setelah diperbarui	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
1 tahun Setelah diperbarui	2 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali kebijakan Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 Tahun	5 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 Tahun	5 Tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN

2 Tahun setelah pelaksanaan Asesment	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 Tahun setelah pelaksanaan Asesment	3 tahun	Musnah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian BUMN
2 tahun	3 tahun	Permanen	Terbatas	Eselon III	Berdampak bagi kinerja Kementerian BUMN
1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak berdampak apapun bagi kinerja Kementerian BUMN

1 tahun setelah pelaksanaan	3 tahun	Musnah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian BUMN
-----------------------------	---------	--------	---------	------------	--